

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 51 PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MALANG NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG  
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP  
(Studi Kasus di Kabupaten Malang)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh  
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**HAFIZ KENDRATAMA**

**NIM. 145010101111105**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2018**

## HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi** : **EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 51 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP. (Studi Kasus di Kabupaten Malang)**

**Identitas Penulis** :  
**a. Nama** : **Hafiz Kendratama**  
**b. NIM** : **145010101111105**  
**Konsentrasi** : **Hukum Administrasi Negara**  
**Jangka waktu penelitian** : **6 bulan**

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Istislam., SH., M.Hum.  
NIP. 19620805 198802 1 001

Dr. Moh.Fadli, S.H., M.H.  
NIP. 19650401 1990021 001

Mengetahui,  
Ketua Bagian  
Hukum Administrasi Negara

Lutfi Effendi, S.H., M.Hum  
NIP. 19600810 198601 1 002



**HALAMAN PENGESAHAN**

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 51 PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
MALANG NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN  
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP  
(Studi Kasus di Kabupaten Malang)**

**OLEH:**

**HAFIZ KENDRATAMA**

**145010101111105**

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal:

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**

Dr. Istislam., SH., M.Hum.  
NIP.195905241 198601 1 001

Dr. Moh.Fadli, S.H., M.H.  
NIP.19650401 1990021 001

**Mengetahui,**

**Ketua Bagian  
Hukum Administrasi Negara**

**Dekan Fakultas Hukum**

Lutfi Effendi,S.H., M.Hum  
NIP. 19600810 198601 1 002

Dr.Rachmad Safa'at, SH. M.Si.  
NIP. 19620805 198802 1 001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan skripsi ini dengan judul EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 51 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi Kasus di Kabupaten Malang) Penulisan laporan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Dengan rasa syukur atas selesainya laporan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT karena atas karunia-Nya laporan ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.
2. Kedua Orang Tua penulis, Drs.Agung Eko Wahyono, Lilies Setyowati S.pd, dan kedua adik penulis Yuqa Allendra dan Adlitra Arhadinendra serta keluarga besar Kaolan dan Moch. Ngalimoen yang senantiasa memberi doa, restu, motivasi dan dukungan bagi penulis untuk menyelesaikan laporan ini.
3. Bapak Dr.Rachmat Safa'at,SH.M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
4. Bapak Dr. Istislam., SH., M.Hum. Sebagai Dosen Pembimbing Utama dan Bapak Dr. Moh.Fadli, S.H., M.H. Sebagai Dosen Pembimbing Pendamping atas bimbingan dan motivasinya.
5. Bapak Eko dan Bapak Randy, dan seluruh aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang yang telah membantu dalam pengumpulan data guna menyelesaikan laporan ini.
6. Pakdhe Imam dan Budhe Titiek sebagai orang tua kedua di malang yang selalu memberi semangat dalam pengerjaan laporan skripsi ini maupun perkuliahan.

7. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2014 ,De Hans yang selalu memberikan kritik dan saran untuk kesempurnaan penulisan laporan ini.
8. Sahabat seperjuangan penulis dari maba hingga lulus dan menjadi keluarga dimalang yaitu Dimas, Ghani, Alfredo, Fahmi, Wildan, Arba, Alam, Wira, Intan, Albina yang selalu membantu dalam segala hal mengenai perkuliahan penulis.
9. Teman yang sudah menjadi saudara (Nanda, Rohman, Mirza, Erik, Dimas Primarizki,) yang selalu memberikan dukungan dalam pengerjaan laporan ini.

Penulis menyadari bahwa dengan segala keterbatasan yang penulis dmiliki, sehingga masih terdapat banyak kekurangan dari laporan ini. Oleh karena itu, kritik, saran dan masukan yang membangun diharapkan agar laporan ini menjadi baik dan benar serta menjadi pemicu bagi penulis lain untuk dapat menghasilkan yang lebih baik lagi. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pembaca dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Malang,

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
RINGKASAN.....	ix
SUMMARY.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas Teori Efektivitas .....	13
B. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas Hukum.....	14
C. Tinjauan Umum Teori Penegakan Hukum .....	19
D. Tinjauan Umum Teori Pencemaran Lingkungan Hidup .....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
A. Jenis Penelitian .....	26



B.	Lokasi Penelitian .....	26
C.	Jenis Data.....	27
D.	Teknik Pengumpulan Data .....	28
E.	Teknik Pengolahan Data.....	30
F.	Populasi,Sample, dan Teknik Sampling .....	30
G.	Tekhnik Analisis Data.....	31
H.	Definisi Operasional .....	33
I.	Sistematika Penulisan.....	34
J.	Jadwal Penelitian.....	35
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>		<b>36</b>
A.	Gambaran Umum Lokasi Peneltian.....	36
1.	Gambaran Umum Kabupaten Malang.....	36
2.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.....	44
A. Efektivitas Penerapan Pasal 84 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .....		57
B. Kendala yang Memengaruhi Efektivitas Penerapan Pasal 84 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Malang .....		66
C. Upaya Mengatasi Kendala Terkait Kendala Yang Memengaruhi Dalam Penerapan Pasal 51 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup .....		72
<b>BAB V KESIMPULAN .....</b>		<b>77</b>
A.	Kesimpulan .....	77
	Saran.....	79

**DAFTAR PUSTAKA.....**

**LAMPIRAN.....**

### **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Peta administrasi kabupaten Malang.....	37
Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang. ....	45
Gambar 3. Peta Letak Sungai Cokro dan PT. Sumber Naga Cemerlang.....	56
Gambar 4. Peta Desa Sumberpasir.....	56





## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tabel Orisinalitas.....	9
Tabel 2 Pelaksanaan penelitian.....	35
Tabel 3 Desa dan Kecamatan Kabupaten Malang.....	38



## RINGKASAN

Hafiz Kendratama, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2018 EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 51 PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi di Kabupaten Malang), Dr. Istislam., SH., M.Hum., Dr. Moh. Fadli S.H., M.Hum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat keefektifan terhadap penegakan sanksi administrasi yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup kepada perusahaan pembuang limbah yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Pasal 51 ayat (2), dijelaskan pada pasal tersebut bahwa sanksi administrasi lingkungan berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin dan pencabutan izin lingkungan. Bermula dari keluhan warga disepanjang aliran sungai yang terganggu dengan tercemarnya sungai maka Dinas Lingkungan Hidup turun ke lapangan untuk meninjau keadaan, dari pemeriksaan awal tersebut maka dicurigai terdapat perusahaan yang dicurigai membuang air hasil pengolahan limbah ke sungai tersebut, kemudian dilakukan investigasi dan ditemukan satu perusahaan yang terbukti membuang limbah ke sungai yaitu perusahaan pembuat minuman ringan PT.SNC dengan produknya yang yaitu kertas belum jadi. Langkah pertama yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup yaitu memberikan pendampingan berupa tindakan penanggulangan serta edukasi tentang penanganan limbah dan memberikan saran agar pengolahan limbah dilakukan oleh pihak ketiga, selain itu dinas lingkungan hidup memberikan masukan agar perusahaan menyediakan tepat IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menampung dan mengolah air limbah, tetapi keadaan saat itu permintaan akan kertas hasil produksi PT. SNC sangat tinggi maka kegiatan produksi juga sangat tinggi, otomatis produksi juga tinggi yang menyebabkan jumlah limbah juga tinggi dan daya tampung tidak muat, dan terjadi kembali pencemaran tersebut di buang disungai Dinas Lingkungan Hidup memutuskan untuk memberi sanksi administrasi berupa teguran tertulis, dengan berjalannya waktu ternyata hal tersebut kurang maksimal akhirnya dinas lingkungan hidup memberikan sanksi teguran tertulis kedua kalinya, dan akhirnya dianggap pencemaran tersebut telah berhenti. Tetapi keadaan dilapangan ternyata berbeda dengan yang diharapkan, pencemaran tersebut masih terjadi meskipun jumlahnya berkurang tidak seperti yang terjadi pada tahun 2015.

**Kata Kunci :** Efektivitas, Penegakan Sanksi Administrasi, Pencemaran Lingkungan.

## SUMMARY

*Hafiz Kendratama, Law of State Administration, Faculty of Law Brawijaya University, July 2018, EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTATION OF ARTICLE 51 OF LOCAL REGULATION OF MALANG REGENCY NUMBER 7 OF 2010 ON CONTROL OF ENVIRONMENTAL POLLUTION AND DESTRUCTION, Dr. Istislam., SH., M.Hum., Dr. Moh. Fadli S.H., M.Hum.*

This research aims to identify whether there is an effectiveness on the enforcement of administrative sanctions given by Environmental Agency to *Waste Disposal Company that caused environmental pollution. According to the Local Regulation of Malang Regency Number 7 of 2010 on Control of Environmental Pollution and Destruction, Article 51 Paragraph (2) explains that environmental administrative sanction, can be formed in written reprimand, government coercion, suspension and revocation of environmental licence. Starting from complaining of society, especially along river, that was disturbed by polluted river, so Environmental Agency conducted inspection to observe the situation. From the first inspection, some companies was suspected for throwing water waste to the river. Then investigation was conducted and it was founded one company that proof threw waste to the river which is the company of beverage, PT.SNC, through its product, the unfinished paper . The first step was conducted by Environmental Agency is giving assistances, such as preventive action and education on waste management, as well as giving advice of waste management which was conducted by third party. Furthermore, Environmental Agency gave advice to the company for providing properly Installation of Water Waste Management to retain and manage water waste. In this situation, however, the demand of paper production from PT. SNC was very high, therefore the production activity was high as well. Automatically, the production was high that caused the waste was also high and the volume was not enough. The pollution happened again in the river. The Environmental Agency decided to give administrative sanctions in the form of written reprimand. By the time, it was not effectively enough. At the end, the Environmental Agency gave written reprimand for the second time and seems that the pollution was stopped. However, the condition in the field is different than it was expected. The Pollution still happens, even the amount was decrease which was not as much as happen in 2015.*

**Key Word:** Effectiveness, Implementation, Environmental Pollution.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pembangunan merupakan upaya sadar dan terencana dalam rangka mengelola dan memanfaatkan sumber daya, guna mencapai tujuan pembangunan yakni meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Dalam kenyataannya, pembangunan yang telah dilakukan selama ini seringkali tidak atau kurang memperhatikan aspek lingkungan dalam pelaksanaannya. Manusia sebagai pusat dari alam, bahkan dipahami sebagai penguasa atas alam yang boleh dan bahkan bisa melakukan apa saja tanpa memperhatikan aspek lingkungan. Sehingga hal tersebut melahirkan sikap-perilaku eksploitatif yang hal ini cenderung memarginalkan kelestarian lingkungan.

Air merupakan bagian dari lingkungan itu sendiri dan kebutuhan utama bagi proses kehidupan. Tidak akan ada kehidupan jika tidak ada air. Air yang bersih sangat didambakan oleh manusia, balik untuk keperluan sehari-hari, untuk keperluan industri, pertanian dan lain sebagainya. Saat ini air menjadi masalah yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Untuk mendapatkan air yang baik sesuai dengan standar tertentu sekarang bukanlah suatu yang mudah karena air sudah banyak tercemar oleh berbagai macam limbah dari kegiatan manusia, baik itu limbah dari

industri, limbah dari kegiatan rumah tangga, maupun limbah dari kegiatan yang lainnya.

Pembuangan limbah secara langsung ke lingkungan inilah yang menjadi penyebab utama terjadinya pencemaran air. Limbah (baik berupa zat padat maupun zat cair) yang masuk ke air akan menyebabkan terjadinya penyimpangan dari keadaan normal air dan ini berarti adalah suatu pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya.

Pencemaran air adalah masuknya limbah ke dalam air yang mengakibatkan fungsi air turun, sehingga tidak mampu lagi mendukung aktifitas manusia dan menyebabkan timbulnya masalah penyediaan air bersih. Bagian terbesar yang menyebabkan pencemaran air adalah limbah cair dari industri, di samping limbah padat berupa sampah domestik.

Jika pencemaran terus berlanjut tanpa diimbangi perbaikan pengolahan limbah yang dibuang, maka tidak ada lagi air bersih yang tersedia dan seluruh bentuk kehidupan terancam punah karena tercemar zat toksik yang berbahaya untuk kesehatan. Untuk menghindari hal itu diperlukan pengawasan yang ketat dari instansi yang berwenang dalam pengelolaan lingkungan. Pengawasan sangat diperlukan untuk memantau keadaan dan tingkat pencemaran yang telah terjadi serta efektivitas pengolahan limbah, sehingga efek negatif dari pencemaran dapat dihindari dan diantisipasi sebelum terjadi pencemaran yang lebih parah. Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan menyebutkan 75 persen air sungai di Indonesia sudah tercemar berat khususnya oleh limbah domestik. Selain itu juga tercemar kualitasnya akibat aktivitas industri, kuantitas dan kualitas limbah yang dibuang ke sungai seringkali tidak terkontrol.<sup>1</sup>

Atas penjelasan diatas tersebut maka lahirlah Undang-Undang yang bertemakan lingkungan sebagai resolusi permasalahan-permasalahan lingkungan yang ada. Karena lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagai dijelaskan dalam pasal 28H Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945.<sup>2</sup> Dengan berbagai pertimbangan serta bertambahnya masalah lingkungan yang kompleks maka diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Selanjutnya disingkat UU PPLH 2009).

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, diharapkan menjadi solusi permasalahan lingkungan yang semakin kompleks ini. Serta dapat diharapkan memberikan perlindungan dan pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh semua orang tak terkecuali masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan dapat mewujudkan pembangunan berwawasan dan pembangunan secara berkelanjutan. Jika ditinjau dari kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun dapat mengancam kelangsungan hidup bagi makhluk hidup yang ada serta bentuk tindakan yang dapat mencemari lingkungan.

---

<sup>1</sup> <https://regional.kompas.com> diakses pada 14 Maret 2018

<sup>2</sup> Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)



Menurut Fuad Amsyari, ada tiga factor penyebab pelanggaran pencemaran lingkungan hidup, khususnya yang disebabkan oleh perusahaan-perusahaan industri, antara lain<sup>3</sup>:

Pertama, perusahaan-perusahaan industri dalam aktivitas bisnisnya hanya mengejar motivasi ekonomi belaka, khususnya meraih keuntungan tanpa mempertimbangkan faktor lingkungan hidup. Kedua, pemahaman perusahaan-perusahaan industri tentang lingkungan hidup pada kenyataannya hanya dianggap sebagai sarana untuk melancarkan aktivitas bisnisnya. Ketiga, rambu-rambu untuk pembentukan lingkungan hidup yang sehat itu tidak dikeembangkan dengan maksimal.

Pembuangan limbah secara langsung ke lingkungan inilah yang menjadi penyebab utama terjadinya pencemaran air. Limbah merupakan sisa akhir dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga). Dimana masyarakat bermukim, disana terdapat berbagai jenis limbah dihasilkan, serta limbah industri cenderung mengandung Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (selanjutnya disebut Limbah B3). Limbah B3 adalah zat, energi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain<sup>4</sup>.

Kabupaten Malang yang berada di Jawa Timur serta berada di titik persimpangan antara Kota Malang dan Kabupaten Blitar merupakan lokasi yang

---

<sup>3</sup> Mukhlis, **Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer**, Setara Press, Malang, 2010, hlm 12

<sup>4</sup> Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)

sangat strategis, ini tentunya memberikan suatu keuntungan yang sangat menggiurkan bagi para pelaku usaha untuk menanamkan modalnya di daerah ini, utamanya menanamkan modal dalam kegiatan perindustrian.

Pertumbuhan industri membawa pengaruh buruk terhadap lingkungan kota, terutama pada sungai-sungai yang ada di Kabupaten Malang. Sungai-sungai yang mengalir di sini mengalami pencemaran yang sudah sangat mengkhawatirkan. Salah satu indikator untuk menentukan kelas itu dengan mengukur jumlah *Biological Oxygen Demand* (BOD), *Chemical Oxygen Demand* (COD), dan *Disolved Oxygen* (DO) yang ada pada air. Hasil uji baku mutu kualitas air sungai oleh Dinas Lingkungan Hidup pada 2016 lalu menunjukkan air sungai di Kabupaten Malang masuk kelas tiga atau hanya cocok untuk pertanian dan perikanan.

Sedikitnya ada Sungai Cokro dan Sungai Brantas yang bahkan menjadi sungai terpanjang kedua di Pulau Jawa itu pun tidak luput dari dampak buruk pencemaran ini. Tingginya tingkat pencemaran membuat sungai ini keruh dan berbau bahkan mulai member dampak yang buruk bagi kesehatan bagi masyarakat yang mengkonsumsi air Sungai Brantas. Sementara nasib yang dialami Sungai Cokro lebih parah karena masyarakat terkena dampak pembuangan air limbah pabrik kertas PT. Sumber Naga Cemerlang (selanjutnya disebut PT. SNC) yang menyebabkan sebagian warga Dusun Ngrangin, Desa Sumberpasir, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang diserang penyakit gatal-gatal. Salah satu penyebabnya tentu saja tidak lain adalah karena pembuangan limbah secara serampangan.

Menurut informasi yang diperoleh dari Bupati LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) Kabupaten Malang bahwa benar pihak pabrik kertas tersebut telah



mencemari lingkungan dengan membuang limbah cair sembarangan. Limbah itu dibuang ke sungai melalui saluran pembuangan yang ada di belakang pabrik. Bermula dari keluhan warga disepanjang aliran sungai yang terganggu dengan tercemarnya sungai maka dilakukanlah usaha mediasi antara masyarakat, di hadapan warga, pihak manajemen pabrik kertas PT. SNC bersepakat tidak akan beroperasi hingga sistem pembuangan air limbah ditata sesuai perundang-undangan agar tidak mencemari lingkungan, namun hingga kini PT. SNC masih beroperasi seperti biasa dengan membuang limbah pada malam hari.<sup>5</sup>

Berdasarkan Lembar Negara Republik Indonesia Pasal 22 ayat (1) Peraturan Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air,<sup>6</sup> pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dilakukan oleh :

- a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sumber Daya Air, untuk kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Air yang menggunakan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas provinsi, Wilayah Sungai lintas negara, dan Wilayah Sungai strategis nasional;
- b. gubernur, untuk kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Air yang menggunakan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota; atau
- c. bupati/walikota, untuk kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Air yang menggunakan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam 1 (satu) kabupaten/kota.

---

<sup>5</sup> <http://www.suaramalang.com/2017/11/> diakses pada 12 Februari 2018

<sup>6</sup> Lembar Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 121 Tahun 2015

Sementara itu berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air pemberi izin pengusaha Sumber Daya Air diberi beberapa kewenangan yaitu :

- a. menetapkan izin;
- b. mengubah izin;
- c. memperpanjang izin; dan
- d. memberikan sanksi administratif.

Dari penjelasan tersebut Bupati Malang yang memperoleh kewenangan untuk menerapkan sanksi administratif terhadap segala aktifitas pencemaran lingkungan, berarti bupati Malang diberi kewenangan untuk memberikan sanksi terhadap pencemaran lingkungan yang telah dilakukan PT. SNC karena kegiatan PT SNC menggunakan Sumber Daya Air dalam wilayah satu Kabupaten. Berdasar hal tersebut tugas penyelidikan dan pengawasan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap PT SNC dimana putusan sanksi administrasi diberikan oleh Bupati sebagai pemberi izin pengusaha Sumber Daya Air.

Demi mencegah dan menanggulangi tercemarnya air yang disebabkan oleh pembuangan limbah pabrik tersebut serta demi menciptakan keamanan dalam masyarakat memanfaatkan air sungai, Pemerintah Daerah Kabupaten Malang mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang berisi :

- (1) Bupati memberikan sanksi administratif kepada Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan

pelanggaran terhadap Perizinan Lingkungan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang di daerah.

(2) Sanksi administratif terdiri atas:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin lingkungan; atau
- d. pencabutan izin lingkungan

Peraturan tersebut kemudian Peraturan Daerah tersebut diperbarui pada tahun 2016 dengan Peraturan Daerah yang baru tetapi tetap memiliki isi yang sama yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut Perda PPLH), Pasal 84 menyebutkan:

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 31 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. teguran tertulis;
  - b. paksaan Pemerintah Daerah;
  - c. pembekuan Izin Lingkungan dan/atau PPLH; atau
  - d. pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dari kewajiban dan tanggungjawab pemulihan atau sanksi pidana.

- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam bentuk Keputusan Bupati.

Pada Pasal 51 ayat (2) dijelaskan bahwa sanksi administrasi lingkungan berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin dan pencabutan izin lingkungan. Pengaturan pada Perda PPLH tersebut paling tidak dapat memberikan sanksi kepada PT. SNC yang masih tetap bisa beroperasi. Melihat adanya kesenjangan antara kenyataan yang terjadi dengan yang diatur dalam Perda PPLH, maka penulis menganggap perlu untuk melakukan penelitian dengan judul

**Efektivitas Penerapan Pasal 51 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.**

Tabel 1.1

## Orisinalitas Penelitian

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	2016	Fannydyawati Meigitasari Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Sungai Mojokrapak (Studi di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang)	1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dalam mengendalikan pencemaran lingkungan di Sungai Mojokrapak?  2. Apakah hambatan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dalam mengendalikan pencemaran	Penelitian ini menganalisis pencemaran lingkungan berupa pembuangan limbah ke sepanjang DAS (Daerah Aliran Sungai), sungai Mojokrapak beserta upaya solutif untuk menanggulangi dampak pencemaran lingkungan di daerah tersebut.

				lingkungan di Sungai Mojokrapak?	
2.	2017	Aji Wijaya Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Penegakan Sanksi Administratif Pencemaran Limbah Industri di Sungai Wangi Kabupaten Pasuruan (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten	1. Bagaimana penegakan sanksi administratif Pasal 76 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap penegakan sanksi administratif pencemaran limbah industri di Kabupaten Pasuruan?	Penelitian menggunakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, membahas kasus kurang pedulinya pihak industri minuman terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh hasil

			Pasuruan)	2. Apa Hambatan BLH Kabupaten Pasuruan dalam menegakkan Pasal 76 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	sisa limbah industri akibat kurang memadainya fasilitas pengolahan limbah.
3.	2018	Hafiz Kendra Tama Fakultas Hukum	Efektivitas Penerapan Pasal 84 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016	1. Bagaimana efektivitas penerapan Pasal 51 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang mengatur sanksi administratif di	Membahas tentang pembuangan limbah yang dilakukan oleh perusahaan kertas di Daerah Aliran Sungai Cokro di desa

		Universitas Brawijaya	tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	Kabupaten Malang?  2. Apa kendala yang memengaruhi efektivitas penerapan Pasal 51 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan di Kabupaten Malang?	Sumberpasisir, membahas tentang efektif atau tidak penerapan peraturan daerah yang mengatur tentang pencemaran lingkungan terhadap kasus tersebut.
--	--	--------------------------	--	---	--



**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana efektivitas penerapan Pasal 51 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang mengatur sanksi administratif di Kabupaten Malang?
2. Apa kendala yang memengaruhi efektivitas penerapan Pasal 51 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan di Kabupaten Malang?

**C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis efektif atau tidaknya pelaksanaan Pasal 51 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang mengatur sanksi administratif di Kabupaten Malang.
2. Untuk menganalisis kendala yang memengaruhi efektivitas penerapan Pasal 51 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Malang.

**D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang bisa di ambil dari penelitian ini:

**1. Manfaat Teoritis**

Sebagai sumbangan pemikiran bagi kalangan akademik dalam pengembangan hukum terutama dalam Hukum Administrasi Negara terkait dengan urgensi

pengaturan perundang-undangan daerah tentang lingkungan hidup agar pelaksanaanya jelas.

## **2. Manfaat Praktis**

### **a. Bagi Pemerintah**

Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran mengenai urgensi pengaturan perundang-undangan daerah tentang pengendalian pencemaran lingkungan agar sungai tidak mudah tercemar dengan limbah pabrik yang dibuang sembarangan.

### **b. Bagi Masyarakat**

Secara praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan penambahan wawasan pengetahuan bagi masyarakat dan tambahan perpustakaan atau bahan informasi bagi segenap pihak yang memerlukan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Teori Efektivitas

Kata efektivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* bila diartikan dalam Bahasa Indonesia adalah berhasil. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif berarti dapat membuahkan hasil, mulai berlaku, ada pengaruh/akibat/efeknya. Efektivitas dapat juga diartikan sebagai pengukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan.<sup>1</sup>

Menurut Harbin Pasolong, efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variable lain, efektivitas merupakan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.<sup>2</sup>

Menurut Mahmudi, efektivitas yaitu hubungan antara keluaran yang dihasilkan dengan tujuan, semakin besar sumbangan keluaran yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan organisasi tersebut.<sup>3</sup>

Menurut Soewono Handyaningrat, pengertian dari efektivitas adalah satuan tujuan sasaran yang tercapai sesuai rencana yang ditetapkan, efektivitas belum tentu efisien tetapi efisien tentu saja efektif. Kemudian yang menjadi indikator keefektifan adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dalam

---

<sup>1</sup> Sulkan Yasin dan Sunarto Hapsoyo, **Kamus Besar Bahasa Indonesia, Praktis, Populer dan Kosa Kata Baru**, Mekar, Surabaya, 2008, hlm 132.

<sup>2</sup> Harbani Pasalong, **Teori Administrasi Publik**, Alfabeta, Bandung, 2007, hlm 4.

<sup>3</sup> Mahmudi, **Manajemen Kinerja Sektor Publik**, Akdemik Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta, 2005

perencanaan yang berpengaruh besar terhadap banyak, baik politik, ekonomi, sosial dan budaya.<sup>4</sup>

Selaras dengan yang di kemukakan oleh Supriyono, efektivitas adalah hubungan antara keluaran antara suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang harus dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.<sup>5</sup>

Menurut Hasan Sholeh, pengertian efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian tentang terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki seseorang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang memang dikehendakinya. Maka sesuatu itu dikatakan efektif kalau akan menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana dikehendaki.<sup>6</sup>

Menurut Martanai dan Lubis, efektivitas merupakan unsure pokok aktivitas untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain suatu organisasi disebut efektif apabila tercapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>7</sup>

## B. Tinjauan Umum tentang Efektivitas Hukum

Menurut Hans Kelsen, definisi efektivitas hukum adalah:

“apakah orang-orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 8.

<sup>5</sup> Supriyono, **Sistem Pengendalian Manajemen (Edisi I)**, BPFE Yogyakarta, 2000, hlm 29.

<sup>6</sup> Hasan Sholeh, **Pengantar Sosiologi Hukum**, Salembaeempat, Jakarta, 2002, hlm 24.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, *Loc. Cit*, hlm 8.

bukan, dan apakah sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi”.

Selain itu juga Hans Kelsen juga membicarakan tentang Validitas hukum, yang berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.

Efektivitas oleh para ahli dengan berbeda-beda tergantung pendekatan yang digunakan oleh masing-masing ahli. Menurut Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa efektivitas hukum adalah hukum yang berfungsi dengan baik merupakan tanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu bertujuan untuk mempertahankan serta melindungi masyarakat.<sup>8</sup> Berbicara masalah efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto terdapat 5 (lima) faktor yang mempengaruhinya yaitu:<sup>9</sup>

### 1. Faktor Hukum

Dalam Undang-Undang arti materiil merupakan peraturan tertulis yang berlaku umum dan dirancang oleh penguasa di tingkat pusat maupun daerah yang sah. Ditentukan dari tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku, termasuk juga ditaati oleh para penegak hukumnya. Tingkat kepatuhan hukum yang tinggi merupakan tolak ukur berhasilnya

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, **Sosiologi Organisasi**, Rajawali Press, Bandung, 1996, hlm 19.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, *Op.Cit*, hlm 8

atau berfungsinya suatu sistem hukum yang berlaku. Dalam hal ini yang termasuk Undang-Undang dalam materiil mencakup:

- a. Peraturan pusat yang berlaku untuk seluruh warga Negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum disebagian wilayah Negara.
- b. Peraturan setempat yang hanya berlaku disuatu tempat atau di suatu daerah saja

Dengan demikian yang termasuk dalam Undang-Undang materiil dapat berupa peraturan pada tingkat pusat ataupun peraturan pada tingkat daerah atau yang disebut dengan Perda. Namun demikian, tentang efektivitas suatu Undang-Undang juga ada yang menyatakan bahwa suatu hukum dikatakan efektif apabila masyarakat berperilaku sesuai dengan yang telah diharapkan atau dikehendaki oleh hukum. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hukum dapat dikatakan efektif apabila suatu peraturan yang dibuat secara tertulis berlaku dalam perilaku kehidupan bermasyarakat.

## **2.Faktor Penegak Hukum**

Secara sosiologi, setiap penegak hukum mempunyai amanah, yang mencakup hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu, hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu tadi merupakan peranan. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan. Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau

peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

### **3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Peranan Hukum**

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung lancar dan efektif. Sarana atau fasilitas antara lain mencakup sumber daya manusia, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.

### **2. Faktor Masyarakat**

Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut beraku dan diterapkan. Kepatuhan hukum dan perilaku masyarakat dalam kehidupan diantaranya, ada yang sendirinya taat pada hukum dan ada yang pura-pura menaatinya, ada yang tidak mengacuhkan sama sekali dan ada pula yang dengan terang-terangan melawan hukum.

### **3. Faktor Kebudayaan**

Faktor kebudayaan berkaitan dengan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup substansi, struktur dan kultur atau kebudayaan.

Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut yang mencakup tatanan lembaga-lembaga, hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Substansi mencakup norma-norma hukum beserta perumusannya sehingga



cara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksanaan hukum maupun pencarian keadilan. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang melandasi hukum yang berlaku.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum merupakan segala upaya yang dilakukan agar hukum benar-benar ditegakkan dalam kehidupan masyarakat. Selain itu agar kaidah hukum berfungsi pada sebuah peraturan bahkan hidup dalam tatanan kehidupan masyarakat. Kaidah hukum atau peraturan tersebut haruslah memenuhi tiga unsur sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Hukum berlaku secara yuridis, apabila penetuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatnya atau menurut cara yang telah ditetapkan serta apabila menunjukkan keharusan anantara suatu kondisi dan akibatnya (J.H.A. Logeman);
- b. Hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif yang artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa (teori kekuasaan), atau diterimanya dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan);
- c. Hukum tersebut berlaku secara filosofis yang memiliki pengertian sesuai dengan cita-cita hukum sebagaimana nilai positif tertinggi.

Menurut Lawrence M. Friedman, efektif tidaknya suatu peraturan perundang-undangan sangat dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor, yang kita

---

<sup>10</sup>*Ibid.* hlm. 53.



kenal sebagai teori efektivitas hukum, yang mana ketiga faktor yang dimaksud adalah:<sup>11</sup>

**a. Subtansi Hukum**

Subtansi hukum adalah menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku, mewakili kekuatan mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

**b. Struktur Hukum**

Struktur hukum adalah para penegak hukum. Penegak hukum adalah mereka yang secara langsung berhubungan dengan bidang penegak hukum.

**c. Budaya Hukum**

Budaya hukum adalah bagaimana sikap masyarakat ditempat hukum itu diterapkan. Apabila kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan dapat diterapkan, maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung, namun apabila masyarakat tidak mau mematuhi aturan-aturan yang ada maka masyarakat akan menjadi faktor penghambat utama dalam penegakan peraturan yang dimaksud.

### **C. Tinjauan Umum Teori Penegakan Hukum**

Teori penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah dan

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Abdullah Mustafa, **Sosiologi Hukum dalam Masyarakat**, Rajawali, Bandung, hlm. 3.

sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>12</sup>

Dalam proses penegakan hukum terdapat faktor-faktor yang memengaruhinya. Faktor tersebut cukup mempunyai arti sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor-faktor tersebut ada lima, yaitu hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja;

1. penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
2. sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum;
3. masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
4. kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan.<sup>13</sup>

Penegakan hukum lingkungan dapat dimaknai sebagai penggunaan atau penerapan instrumen-instrumen dan sanksi-sanksi dalam lapangan hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata dengan tujuan memaksa subjek hukum yang menjadi sasaran mematuhi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 3

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto *Op. Cit.* hlm. 5

<sup>14</sup> Takdir Rahmadi, **Hukum Lingkungan**, Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 207.

Dalam pembahasan kali ini penulis lebih menitik beratkan pada hal yang berkaitan dengan sanksi administrasi, Perda PPLH memuat empat jenis sanksi hukum administrasi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (2) yaitu teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan dan pencabutan izin lingkungan.<sup>15</sup>

Pengertian dari penegakan hukum lingkungan itu sendiri serta hukum administrasi karena penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan aparat dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum yaitu administrasi, perdata, dan pidana. Dengan demikian penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan sarana administratif, keperdataan dan kepidanaan.

Penggunaan hukum administrasi dalam penegakan hukum lingkungan mempunyai dua fungsi yaitu bersifat preventif dan represif. Preventif yaitu berkaitan dengan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang terhadap pelaku kegiatan, dan dapat juga berupa pemberian penerangan dan nasihat. Sedangkan sifat represif berupa sanksi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang terhadap pelaku atau penanggung jawab kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran.<sup>16</sup>

Penegakan hukum secara preventif berarti pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkret yang menimbulkan sangkaan bahwa peraturan

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 212

<sup>16</sup> Andi Hamzah, **Penegakan Hukum Lingkungan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 48

hukum telah dilanggar. Instrumen penting dalam penegakan hukum preventif adalah penyuluhan, pemantauan dan penggunaan kewenanga yang bersifat pengawasan (pengambilan sampel, penghentian mesin dan sebagainya). Dengan demikian izin penegak hukum yang utama disini adalah pejabat atau aparat pemerimah yang berwenang memberi izin dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.

Penegakan hukum administrasi yang bersifat represif merupakan tindakan pemerintah dalam pemberian sanksi administrasi terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup. Sanksi administrasi berupa:<sup>17</sup>

1. pemberian teguran keras;
2. pemabayaran uang paskaan;
3. penanguhan berlakunya izin;
4. pencabutan izin.

Penegakan hukum lingkungan di bidang administrasi memiliki beberapa manfaat strategis dengan perangkat penegakan hukum lainnya oleh karena :

1. penegakan hukum lingkungan dapat dioptimalkan sebagai perangkat pencegahan;
2. penegakan hukum lingkungan administrasi lebih efisien dari sudut pembiayaan bila dibandingkan dengan penegakan hukum perdata dan pidana. Pembiayaan untuk penegakan huku administrasi hanya meliputi pembiayaan pengawasan lapangan dan pengujian laboratorium;

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 50

3. Penegakan hukum lingkungan administrasi lebih memiliki kemampuan mengundang partisipasi masyarakat dimulai dari proses perizinan, pemantauan, penataan/ pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam mengajukan keberatan untuk meminta pejabat tata usaha negara dalam memberlakukan sangsi administrasi.

Perangkat penegakan hukum administrasi sebagai sebuah sistem hukum dan pemerintahan paling tidak harus meliputi, yang merupakan prasyarat awal dari efektivitas penegakan hukum lingkungan administrasi yaitu:

1. izin yang didayagunakan sebagai perangkat pengawasan dan pengendalian;
2. persyaratan dalam izin dengan merujuk pada AMDAL, standar baku mutu lingkungan, peraturan perundang undangan;
3. mekanisme pengawasan penataan;
4. keberadaan pejabat pengawas yang memadai secara kualitas dan kuantitas;
5. sanksi administrasi.<sup>18</sup>

Sanksi merupakan bagian penutup yang penting di dalam hukum, termasuk dalam hukum administrasi. Pada umumnya tidak ada gunanya memasukkan kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan bagi masyarakat di dalam peraturan perundang-undangan manakala dalam peraturan perundang-undangan tersebut tidak disertakan sanksi yang tegas. Dengan demikian hakikat sanksi merupakan unsur yang memperteguh atau memperkuat suatu instrumen hukum sehingga adanya kewajiban hukum.<sup>19</sup>

Sepuluh mekanisme penegakan hukum lingkungan administrasi yaitu:

---

<sup>18</sup> Mas Achmad Santosa, **Pengembangan dan Penegakan Hukum Administrasi di Bidang Lingkungan Hidup dalam Konteks Otonomi Daerah**, Semarang, 2002, him. 1

<sup>19</sup> Lutfi Effendi, **Pokok-Pokok Hukum Administrasi**, Bayumedia Publishing Cet-2, Malang, 2004, Hlm. 89

1. permohonan izin harus disertai informasi lingkungan sebagai alat pengambilan keputusan-studi AMDAL: RKL, dan RPL, atau UKL dan UPL dan informasi-informasi lingkungan lainnya.
2. konsultasi publik dalam rangka mengundang berbagai masukan dari masyarakat sebelum izin diterbitkan.
3. keberadaan mekanisme pengolahan masukan publik untuk mencegah konsultasi publik yang bersifat basa basi.
4. atas dasar informasi-informasi yang disampaikan dan masukan publik, pengambilan keputusan berdasarkan kelayakan lingkungan di samping kelayakan dari sudut teknis dan ekonomis dilakukan.
5. apabila izin telah dikeluarkan, maka izin tersebut harus diumumkan dan bersifat terbuka untuk umum.
6. laporan penataan yang dibuat secara berkala oleh pemegang izin dan disampaikan kepada regulator.
7. inspeksi lapangan dibuat secara berkala dan impromptu sesuai dengan kebutuhan.
8. tersedianya hak dan kewajiban pengawas dan hak serta kewajiban objek yang diawasi yang dijamin oleh undang-undang.
9. pemberlakuan sanksi administrasi yang diberlakukan secara sistematis dan bertahap.
10. mekanisme koordinasi antara pejabat yang bertanggung jawab di bidang penegakan hukum administrasi dengan penyidik pidana apabila pelanggaran telah memenuhi unsur-unsur pidana.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Widia Edorita, **Peranan AMDAL Dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara Asia Tenggara**, 2007, hlm. 44

## D. Tinjauan Umum Teori Pencemaran Lingkungan Hidup

### 1. Definisi Pencemaran

Pencemaran dalam pengertiannya sehari-hari adalah selalu menunjukkan keadaan dan kondisi yang lebih berat dari sekedar “pengotoran” belaka<sup>21</sup>. Pencemaran itu selalu dilukiskan keadaan dan kondisi yang lebih parah dari sekedar *contamination* (pengotoran) belaka. Maka mengenai tata pengaturan penanganan dan penyelesaian akibatnya juga ditampilkan perbedaan yang mencolok yang selalu harus diperhatikan secara seksama.<sup>22</sup>

Pencemaran itu mengandung di dalamnya secara mendasar dan konsepsional isi dan substansi pengertian yang menunjukkan perpaduan makna dari (1) pengotoran (*conlamination*), yang menimbulkan: (2) pemburukan (*deterioration*), hingga menyebabkan: (3) menurunnya kualitas (*degradation*) dan mengakibatkan: (4) merosotnya nilai (*devaluation*), yang sampai (5) mengurangi dan melemahkan daya penggunaannya.

Secara wajar, yang kesemuanya itu lazim ditampilkan juga sebagai pengertian : “kerusakan pencemaran” (*pollution damage*)<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Munadjat Danusaputro, **Hukum Lingkungan (Jilid 5: Dalam Pencemaran Lingkungan Melandasi Sistem Hukum Pencemaran)**, Binacipta, Yogyakarta, 1986. hlm. 33

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 34

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 35



Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia. Akibatnya kualitas turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.<sup>24</sup>

Definisi lainnya pencemaran lingkungan hidup ditinjau dari segi ilmu kimia lingkungan adalah peristiwa penyebaran bahan kimia dengan kadar tertentu yang dapat merubah keadaan keseimbangan pada daur materi baik keadaan struktur maupun fungsinya sehingga mengganggu keseimbangan.<sup>25</sup>

Pencemaran lingkungan adalah berubahnya komposisi air dan udara yang disebabkan oleh aktivitas manusia dan lain sehingga menurunkan kualitas dan fungsi air atau udara.<sup>26</sup> Apabila dilihat dari segi ilmiah, suatu lingkungan dapat disebut sudah tercemar bila memiliki beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut adalah:<sup>27</sup>

1. Suatu zat, organisme, atau unsur-unsur yang lain (seperti gas, cahaya, energi) telah tercampur (terintroduksi) ke dalam sumber daya lingkungan tertentu, dan
2. Arenanya menghalangi/mengganggu fungsi atau peruntukan dari sumber dari sumber daya lingkungan tersebut.

---

<sup>24</sup> Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>25</sup> [www.belajarbagus.com](http://www.belajarbagus.com), diakses Pada Kamis, 22 Februari 2018, Pukul 17.15 WIB

<sup>26</sup> N.H.T Siahaan, **Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan**, Erlangga, Jakarta, 2009 hlm 280

<sup>27</sup> Muhammad Erwin, **Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup**, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 37



## 2. Jenis-jenis Pencemaran

Pencemaran lingkungan dibagi menjadi tiga, yaitu :

### 1) Pencemaran air

masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.<sup>28</sup>

### 2) Pencemaran tanah

Pencemaran tanah adalah keadaan dimana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah tanah alami. Pencemaran tanah dapat terjadi karena pencemaran secara langsung. Misalnya menggunakan pupuk secara berlebihan, pemberian pestisida, deterjen berbusa yang tak dapat terurai oleh makhluk pengurai dan pembuangan limbah seperti plastik.<sup>29</sup>

### 3) Pencemaran udara

Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan komponen lain ke udara atau berubahnya berubahnya tatanan udara oleh manusia atau proses alam, sehingga kualitas udara turun ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara tak lagi berfungsi sesuai yang diperuntukannya.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Pramudya Sunu, **Melindungi Lingkungan Dengan Menerapkan ISO 14001**, Gramedia Widhiarsana Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 97

<sup>29</sup> A. Tresna Sastrawijaya, **Pencemaran Lingkungan**, Rineka Cipta, Jakarta, 2000 hlm. 67

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 67

### 3. Penyebab Terjadinya Pencemaran Lingkungan Hidup

Penyebab besar pencemaran lingkungan disebabkan manusia, sebab dari pencemaran lingkungan adalah sebagai berikut:<sup>31</sup> *pertama*, sampah buangan manusia dan sampah dari pemukiman penduduk, *kedua* subsidi energi yang dibawa manusia ke dalam lingkungan bertambah kompleks karena penggunaan zat kimia pemberantas DDT dan pembasmi hama. DDT digunakan petani untuk mengusir hama di lahan pertanian, DDT tidak hanya berdampak bagi hama, tapi juga hewan yang lain karena mempengaruhi rantai makanan dari satu hewan ke hewan lainnya yang mengakumulasi zat tersebut dengan demikian manusia yang masuk dalam rantai makanan turut terkena dampaknya.

---

<sup>31</sup> Fuad Amsyari **Prinsip-prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan**, Ghalia Indonesia, Jakarta 1981 hlm.48



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul berkaitan dengan efektivitas penerapan Pasal 51 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Malang. Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian pada ilmu hukum normatif tetapi bukan mengkaji sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja.<sup>1</sup> Adapun pendekatan sosiologis dilakukan melalui penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh dari lembaga pemerintah atau masyarakat.<sup>2</sup>

#### B. Lokasi Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian ini berada

1. Lokasi Penelitian terletak di wilayah Kabupaten Malang

Lokasi penelitian terdapat di beberapa tempat, antara lain:

---

<sup>1</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 53.

<sup>2</sup> *Ibid.* Hlm. 110.

- a) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Jl. KH. Agus Salim No.7 - Malang Telp. / Fax. (0341) 325454. Karena Dinas yang memiliki kewenangan untuk mengurus masalah pencemaran limbah tersebut.
- b) Desa Sumberpasir karena Sungai Cokro yang tercemar parah oleh limbah pabrik
- c) PT. Sumber Naga Cemerlang

### C. Jenis Data

Data dalam penelitian ini dibedakan meliputi data yang didapat langsung dari masyarakat (data primer) dan data dari bahan kepustakaan (data sekunder).<sup>3</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data tersebut yaitu:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang relevan dengan penelitian ini dengan pemecahan masalah yang diperoleh dari sumber utama yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan dikumpulkan langsung oleh peneliti dari obyek di lapangan.<sup>4</sup> Data primer dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dengan pihak terkait, dalam hal ini data primernya adalah hasil wawancara yang diperoleh dari:

- (1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang;
- (2) Pengelola Pabrik PT.SNC; dan

---

<sup>3</sup> *Ibid.* Hlm. 156.

<sup>4</sup> *Ibid.* Hlm. 156.

- (3) Masyarakat di wilayah Kabupaten Malang dimana tempat sungai tercemar.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaah perundang-undangan terkait, literatur atau bahan pustaka, jurnal serta artikel yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian ini yang diperoleh dari:

a. Bahan Hukum Primer;

Bahan hukum primer merupakan hasil penelaahan peraturan perundang-undangan terkait, khususnya Perda Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 tentang PPLH.

b. Bahan Hukum Sekunder;

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang dapat menjelaskan terhadap bahan hukum primer, yang berupa perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku referensi, jurnal ilmiah, surat kabar, pamphlet, leaflet, dan berita *website*.<sup>5</sup>

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat menjelaskan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang

---

<sup>5</sup> *Ibid.* Hlm. 157.

berupa kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.<sup>6</sup> Data tersier yang di gunakan peneliti adalah menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik/metode pengumpulan data merupakan cara untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian. Lazimnya pada suatu penelitian, ada 3 jenis metode dalam pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan langsung atau observasi, dan wawancara atau *interview*.<sup>7</sup> Teknik pengambilan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, studi dokumentasi dan studi pustaka. Penggunaan teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam mengumpulkan informasi seputar permasalahan yang sedang dibahas menggunakan tehnik sebagai berikut :

1. teknik wawancara, yaitu melau proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan, dengan melalui pedoman wawancara dan mencatat secara sistematis. Tehnik ini berfungsi kaitanya untuk mendapatkan informasi secara mendalam dan jelas tentang permasalahan penelitian.<sup>8</sup>
  2. observasi atau pengamatan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu pula.<sup>9</sup>
- Peneliti melakukan penelitian dengan menjadi observer yang

---

<sup>6</sup> *Ibid.* Hlm. 158.

<sup>7</sup> *Ibid.* Hlm. 161.

<sup>8</sup> Rianto Adi. 2010. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit. Hlm. 72.

<sup>9</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Op. Cit.* Hlm. 167.



melakukan pengamatan dan memantau pencemaran lingkungan di Sungai Cokro kabupaten Malang.

3. dokumentasi juga merupakan salah satu metode pengumpulan data secara kualitatif dengan melihat menganalisis dokumen dokumen (arsip) yang berkaitan dengan masalah atau materi peneliti.<sup>10</sup>
4. Studi pustaka adalah studi pustaka yang dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder, dengan cara mempelajari konsep Hukum Lingkungan dan cara penyelesaiannya dengan cara membaca, mengutip, mencatat, dan mengidentifikasi data yang sesuai dengan permasalahan.

#### **E. Teknik Pengolahan Data**

Pengolahan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara:

1. pemeriksaan data, yaitu melakukan pemeriksaan data yang terkumpul apakah data yang diperoleh sudah cukup lengkap, sudah cukup benar dan sesuai dengan permasalahan;
2. klasifikasi data, yaitu dilakukan dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan bidang pokok bahasan agar memudahkan dalam menganalisis; dan
3. penyusunan data, yaitu dilakukan dengan cara menyusun dan menempatkan data pada tiap-tiap pokok bahasan dengan susunan yang sistematis sehingga memudahkan dalam pembahasannya.

---

<sup>10</sup> Rianto Adi. *Op. Cit.* Hlm. 61.

## F. Populasi, Sample, dan Teknik Sampling

### 1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek, gejala, individu, dan kejadian yang akan diteliti. Dalam hal ini populasi yang dipilih adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, Pengusaha Pabrik di Kabupaten Malang dan Masyarakat Kabupaten Malang untuk diambil keterangan terhadap judul penelitian ini yang merupakan sumber data yang dibutuhkan.

### 2. Sampel dan Teknik Sampling

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari suatu populasi<sup>11</sup>. Sampel di tentukan berdasarkan teknik penentuan sampel *purposive sampling*, sampel diberikan kepada pihak yang berkompeten memberikan data dan sampel diambil dengan asumsi bahwa sampel yang terpilih mengetahui dan dapat menjawab masalah yang dijadikan sebagai kajian dalam penelitian, dalam hal ini Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, PT.SNC, serta warga desa sepanjang daerah aliran Sungai Cokro

## G. Teknik Analisis Data

Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis deskriptif kualitatif, penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik

---

<sup>11</sup> Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 119.

dan dengan cara deskripsi dalam bentuk serangkaian kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>12</sup>

Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Metode penelitian kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan, pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden, ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola yang dihadapi.

Penelitian kualitatif bisa dibagi menjadi empat tahap, yaitu tahap sebelum ke lapangan, analisis data, dan penulisan laporan. Pertama, tahap perlapangan yang mempersoalkan segala macam persiapan yang diperlukan sebelum peneliti terjun ke dalam kegiatan penelitian itu sendiri. Kedua, dibahas usaha penelitian agar secara bersungguh-sungguh berusaha memahami latar penelitian. Disamping itu peneliti benar-benar dengan segala daya, usaha, dan tenaganya mempersiapkan dirinya menghadapi lapangan penelitian. Ketiga, dikemukakan konsep analisis data, juga dipersoalkan bahwa analisis data dibimbing oleh usaha untuk menemukan tema dan hipotesis kerja. Keempat, penulisan laporan. Dalam mengolah data atau proses analisisnya peneliti memberikan hasil data dari

---

<sup>12</sup> Lexy. J. Moleong, **Metode Penelitian Kualitatif**, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2007 hlm 49

responden secara tertulis maupun lisan, serta perilaku responden yang nyata, yang diteliti dan dipelajari secara utuh dan mendalam.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif, yaitu dengan cara menggambarkan informasi yang diperoleh untuk kemudian informasi tersebut dipelajari dan dianalisis yang diperoleh untuk kemudian informasi tersebut dipelajari dan dianalisis agar mendapatkan suatu pembelajaran yang komperhensif dan menyeluruh. Selain itu, dengan pendekatan kualitatif diharapkan dapat diungkapkan situasi dan permasalahan yang dihadapi dalam permasalahan ini.

## **H. Definisi Operasional**

Terdapat beberapa istilah yang digunakan peneliti dalam menganalisis penelitian ini, yaitu:

### **1. Pengertian Sanksi**

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar aturan yang ditetapkan, disini sanksi diberikan oleh Bupati

jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap Perizinan Lingkungan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang di daerah.

## 2. Pengertian Sanksi Administratif

Sanksi Administratif adalah pemberian sanksi oleh Bupati Kabupaten Malang berupa pembayaran denda apabila ada yang melanggar dari kewajibannya untuk membayar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

## 3. Sungai

Sungai yang menjadi tempat pengawasan adalah Sungai Cokro yang berada di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Malang.

## 4. Limbah

Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi industri dari Pabrik SNC yang telah mencemari Sungai Cokro karena mengandung bahan kimia yang berbahaya.

## I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari skripsi ini bertujuan agar penulisan dapat terarah dan sistematis. Adapun sistematika skripsi ini disusun sebagai berikut:

### a) Bab I. Pendahuluan

Pada bagian bab ini, peneliti akan menjelaskan bagan atau struktur untuk menjelaskan latar belakang permasalahan yang digambarkan secara umum, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian

b) Bab II. Tinjauan Pustaka

Pada bagian bab ini membahas tentang tinjauan umum teori efektivitas, tinjauan umum efektivitas hukum, tinjauan umum penegakan hukum, tinjauan umum teori pencemaran lingkungan hidup

c) Bab III. Metode Penelitian

Pada bagian bab metode ini, peneliti menjelaskan mengenai jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis data, teknik pengambilan data, teknik analisis, definisi operasional

d) Bab IV Hasil dan Pembahasan

Pada bagian bab hasil dari pembahasan ini, peneliti menjelaskan mengenai kronologi kasus secara mendalam, serta diikuti dengan hasil analisis peneliti untuk menjawab rumusan masalah yang diteliti.

e) Bab V Penutup

Pada bagian bab penutup ini, peneliti menjelaskan mengenai kesimpulan dari peneliti ini yang disertai juga dengan saran-saran dari peneliti.

f) Daftar Pustaka

Pada bagian daftar pustaka, peneliti mencantumkan bahan-bahan rujukan penelitian ini berupa buku-buku serta peraturan perundang-undangan terkait.

## J. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Tabel 3.1

Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No	Keterangan	Bulan Ke-			
		I	II	III	IV
1	Persiapan	x			
2	Melakukan Studi Pustaka	x	x		
3	Menyusun Instrumen Penelitian		x		
4	Melaksanakan Penelitian		x	x	
5	Menganalisis Data			x	x
6	Menyusun Laporan Skripsi				x





## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Kabupaten Malang

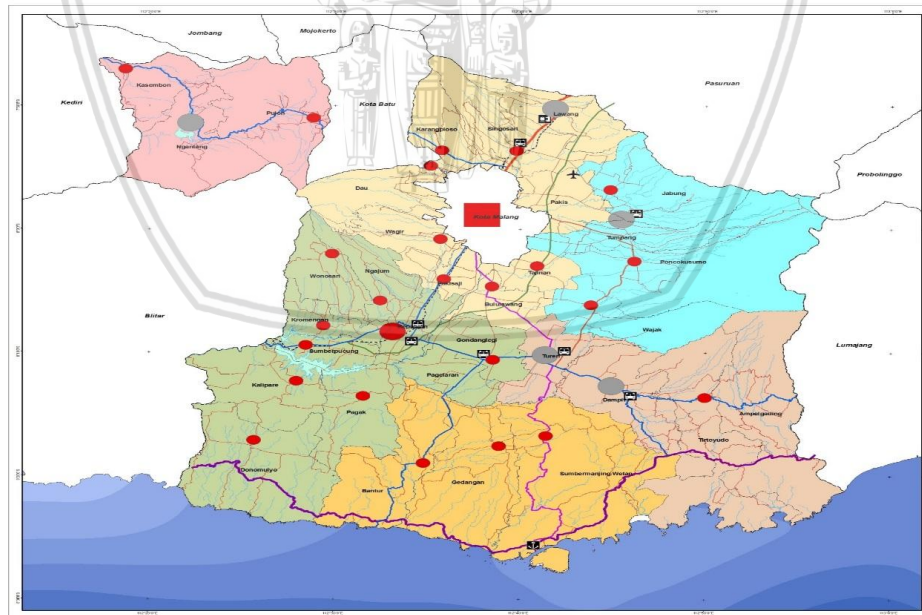
Wilayah Kabupaten Malang dengan luas wilayahnya 3.534,86 km<sup>2</sup> terletak antara 112°17',10,90" Bujur Timur dan 112°57',00,00" Bujur Timur dan antara 7°44',55,11" Lintang Selatan dan 8°26',35,45" Lintang Selatan. Dengan luas wilayah sekitar 3.238,26 km<sup>2</sup> Kabupaten Malang terletak pada urutan luas terbesar kedua setelah Kabupaten Banyuwangi dari 38 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Malang adalah sebuah kawasan yang terletak pada bagian tengah selatan wilayah Propinsi Jawa Timur. Berbatasan dengan enam kabupaten dan Samudera Indonesia. Sebelah Utara-Timur, berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan dan Probolinggo. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Lumajang. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Samudera Indonesia. Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Blitar. Sebelah Barat Utara, berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Mojokerto. Letak geografis sedemikian itu menyebabkan Kabupaten Malang memiliki posisi yang cukup strategis. Hal ini ditandai dengan semakin ramainya jalur transportasi utara maupun selatan yang melalui Kabupaten Malang dari waktu ke waktu.

Kondisi topografi Kabupaten Malang merupakan daerah dataran tinggi yang dikelilingi oleh beberapa gunung dan dataran rendah atau daerah lembah

pada ketinggian 250 - 500 meter di atas permukaan laut (dpl) yang terletak di bagian tengah wilayah Kabupaten Malang. Daerah dataran tinggi merupakan daerah perbukitan kapur (Pegunungan Kendeng) di bagian selatan pada ketinggian 0-650 mdpl, daerah lereng Tengger-Semeru di bagian timur membujur dari utara ke selatan pada ketinggian 500-3600 mdpl dan daerah lereng Kawi-Arjuno di bagian barat pada ketinggian 500-3.300 mdpl.

Batas wilayah administrasi Kabupaten Malang:

- a) Sebelah utara : Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Mojokerto
- b) Sebelah selatan : Samudra Indonesia
- c) Sebelah timur : Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang
- d) Sebelah Barat : Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri



**Gambar 4.1**  
**Peta Administrasi Kabupaten Malang**

### (1) Administrasi Kabupaten Malang

Kabupaten Malang secara administratif terdiri dari 33 kecamatan, 378 desa, 12 kelurahan, 3.125 Rukun Warga (RW), dan 14.352 Rukun Tetangga (RT)

**Tabel 4.1**  
**Daftar Kecamatan dan Desa Kabupaten Malang**

No	Kecamatan	Jumlah Desa
1.	Kasembon	6
2.	Ngantang	13
3.	Pujon	10
4.	Dau	10
5.	Lawang	12
6.	Singosari	17
7.	Karangploso	9
8.	Jabung	15
9.	Pakis	15
10.	Tumpang	15
11.	Poncokusumo	17
12.	Tajinan	12
13.	Bululawang	14
14.	Turen	17
15.	Wajak	13
16.	Pakisaji	13
17.	Ngajum	9
18.	Wonosari	8
19.	Kromengan	7
20.	Sumberpucung	7
21.	Kepanjen	18
22.	Gondanglegi	14
23.	Pagelaran	10
24.	Kalipare	9
25.	Donomulyo	8
26.	Pagak	8
27.	Bantur	10
28.	Gedangan	7
29.	Sumberwajing Wetan	14
30.	Dampit	12
31.	Tirtoyudo	13
32.	Ampelgading	13

33.	Wagir	12
-----	-------	----

## (2) VISI

Visi dan misi pembangunan di Kabupaten Malang selama 5 tahun mendatang (2016-2021). Hal ini sejalan dengan amanat di dalam Pasal 263 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disingkat UU Pemda) yang menjelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. UU Pemda ini memberi penegasan bahwa daerah saat ini memiliki kewenangan lebih untuk mengatur daerahnya, tanpa meninggalkan sinergitas dengan program-program pembangunan baik dari pemerintah pusat maupun provinsi.

Di samping mengacu pada regulasi di atas, sistematika pembahasan visi dan misi dalam sub-bab ini juga merujuk pada Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 1 angka 12 yang menyatakan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Adapun dalam setiap periodenya visi

mempunyai jangkauan untuk dicapai selama 5 tahun. Hal ini berarti bahwa visi Kabupaten Malang yang tercantum dalam RPJMD tahun 2016 harus dicapai pada tahun 2021. Dalam tujuannya, visi juga dapat mengarahkan dan mendorong semua *stakeholder* (pemerintah dan non pemerintah) untuk berkontribusi dalam pencapaiannya. Visi dan misi juga bersifat menjadi inspirasi, arah, dan posisi (setting) Kabupaten Malang di masa depan. Selanjutnya, pada Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD, serta memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJMN.

Oleh karenanya, maka perumusan visi, misi, dan program dalam RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 ini tidak hanya berasal dari visi, misi dan program Kepala Daerah saja, namun juga telah dilakukan beberapa proses penyesuaian dari semua acuan dimaksud. Visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 merupakan visi dan misi yang sebelumnya telah menjadi materi kampanye oleh pasangan pemenang pada saat Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Malang Tahun 2015 lalu. Hal ini ditegaskan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menyebutkan bahwa setiap calon wajib untuk menyertakan visi pada saat mencalonkan diri menjadi kepala daerah.

Maka dari itu, mengacu pada hasil Pemilukada Tahun 2015, RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 ini merupakan hasil perumusan dari pasangan pemenang Pemilukada Kabupaten Malang yang ditetapkan pada tahun

2016 yakni Dr. H. Rendra Kresna dan H. Sanusi. Visi Pembangunan Kabupaten Malang berpedoman pada arah pembangunan Kabupaten Malang sebagaimana tertuang dalam RPJPD 2005-2025, capaian pembangunan tahun 2010-2015, memerhatikan kondisi masyarakat Kabupaten Malang saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah. Visi Kabupaten Malang juga mempunyai semangat untuk menjalankan komitmen pembangunan nasional sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Presiden Republik Indonesia, salah satu komitmen tersebut adalah sektor pembangunan desa. Kabupaten Malang pada lima tahun ke depan akan memerhatikan pembangunan desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini menjadi penting dikarenakan kondisi geografis Kabupaten Malang yang luas membuat akses pelayanan dan informasi berpotensi untuk tidak terdistribusi secara cepat dan merata.

Pembangunan desa setidaknya juga merupakan langkah konkrit untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa dan kabupaten secara umum. Untuk mengupayakan hal itu, Pemerintah Kabupaten Malang menjadikan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Komitmen Pemerintah Kabupaten Malang terhadap pembangunan desa, salah satunya diwujudkan melalui penjabaran visi misi, yakni dalam tujuan dan sasaran. Setidaknya beberapa penjabaran dalam sasaran diarahkan untuk pembangunan desa, salah satunya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik Pemerintah Desa. Melalui kualitas pelayanan publik



yang baik dan memberi aksesibilitas kepada kelompok rentan, seperti difabel dan PMKS, maka hal ini akan mendorong tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah.

Selain itu, pemerintah kabupaten juga akan memberikan apresiasi mengenai usulan atau partisipasi warga desa yang dimasukkan dalam agenda Musrenbang Desa. Diharapkan melalui hal tersebut kebijakan pembangunan tidak lagi hanya dengan sistem *top-down* melainkan juga *bottom-up*. Selain itu, dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2016-2021, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Malang yang berlandaskan pada sebuah nilai filosofis, yakni: Pertama: niat untuk konsisten dalam menjalankan amanat konstitusi dan pembangunan, atau diberi istilah *MADEP*. Kedua Untuk mewujudkan niat tersebut pemerintah berkomitmen untuk memiliki sikap kedisiplinan, bekerja keras dan produktif dalam melaksanakan pembangunan, atau disebut dengan *Manteb*.

Sedangkan untuk tujuan pembangunannya dalam 5 tahun kedepan, Pemerintah Kabupaten Malang menginginkan agar setiap pembangunan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat, atau diberi istilah *Manetep*. Dengan mempertimbangkan tiga landasan filosofis dan pedoman arah pembangunan di atas, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2016-2021, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Malang sebagai berikut:

**"Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB MANETEP"**

Rumusan visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: "Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna

Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan”. Penggunaan istilah **MADEP-MANTEB-MANETEP** merupakan filosofi pembangunan yang bukan hanya memiliki arti yang baik, melainkan juga memiliki akar historis pada kebudayaan nusantara dan Kabupaten Malang. Oleh karena itu, **MADEP-MANTEB-MANETEP** sebagaimana telah sedikit disinggung di paragraf sebelumnya bukanlah sebuah akronim, melainkan memiliki kesatuan makna yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

### (3) MISI

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun misi pembangunan Kabupaten Malang untuk 5 tahun ke depan adalah sebagai berikut:

- (1) Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal, dan supremasi hukum;
- (2) Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi;
- (3) Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia;
- (4) Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif; dan
- (5) Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa;
- (6) Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan;
- (7) Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

## **2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang**

### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup**

Perangkat Daerah urusan lingkungan hidup di Kabupaten Malang sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, adalah Badan Lingkungan Hidup yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasinya mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang. Sejalan dengan dinamika yang ada, mengacu pada UU Pemda, nomenklatur perangkat daerah tersebut berubah menjadi Dinas Lingkungan Hidup dengan struktur organisasi secara lengkap terdiri dari :

#### **1. Kepala Dinas**

#### **2. Sekretaris, meliputi:**

- Sub bagian Umum dan Kepegawaian
- Sub Bagian Keuangan
- Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

#### **3. Bidang Tata Lingkungan, terdiri dari:**

- Seksi Kajian Strategis Lingkungan
- Seksi Kajian Dampak Lingkungan
- Seksi Pemeliharaan

#### **4. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, terdiri dari:**

- Seksi Pengurangan Sampah
- Seksi Penanganan Sampah
- Seksi Penanganan Limbah B3

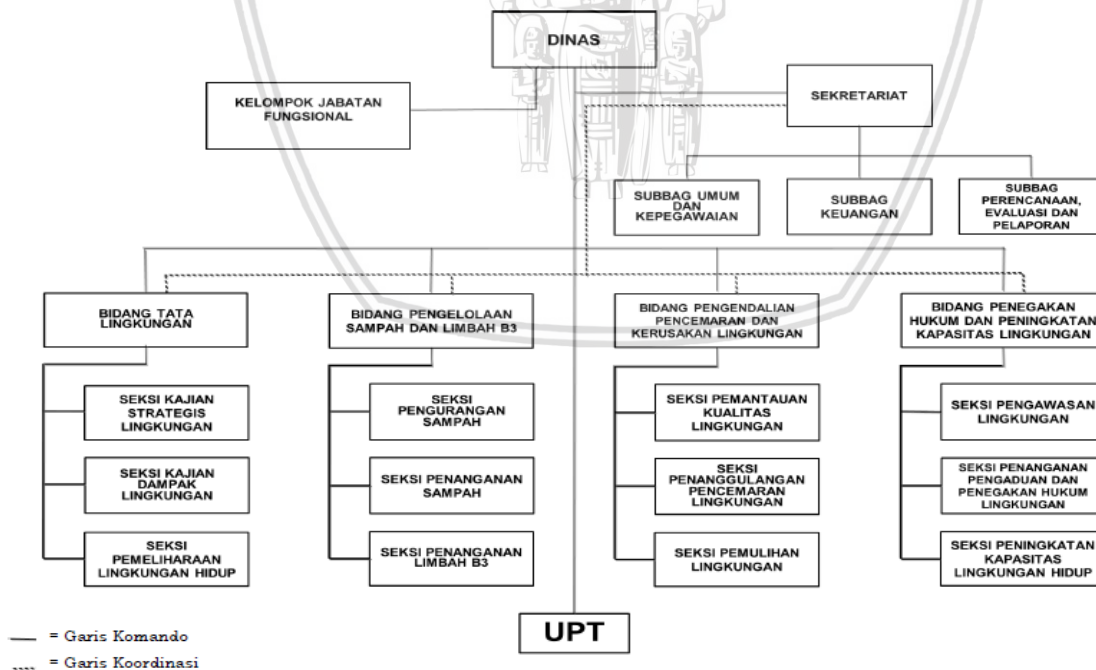
#### **5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, meliputi:**

- Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan
- Seksi Penanggulangan Pencemaran Lingkungan
- Seksi Pemulihan Lingkungan

**6. Bidang Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, meliputi:**

- Seksi Pengawasan Lingkungan
- Seksi Penanganan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan
- Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Struktur organisasi tersebut juga akan didukung oleh Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang akan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau teknis penunjang Dinas khususnya dalam penanganan sampah. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup secara lebih jelas adalah sebagai berikut.



**Gambar 4.2**  
**Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang**

**Tugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang meliputi:**

1. Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang lingkungan hidup;
2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas, maka Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

1. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk data base serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
2. Perencanaan strategis pada Dinas Lingkungan Hidup;
3. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang lingkungan hidup;
5. Pelaksanaan tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta penegakan hukum dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
6. Evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
7. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang wajib dilaksanakan dalam urusan lingkungan hidup;
8. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Dinas Lingkungan Hidup;
9. Pembinaan UPT dalam lingkup tugasnya;
10. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan bidang lingkungan hidup di lingkup Pemerintah Daerah;
10. Pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga lainnya; dan
11. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh:

**(1) Sekretariat yang mempunyai tugas:**

- a. Melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Dinas Lingkungan Hidup, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat- menyurat, penggandaan, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat, urusan keuangan; dan

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat mempunyai fungsi:

1. Perencanaan kegiatan kesekretariatan;
2. Pengelola urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
3. Pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
4. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan kekayaan daerah;
5. Penyelenggaraan kegiatan surat-menyurat, pengetikan, penggandaan, kearsipan;
6. Pengelolaan administrasi perlengkapan dan mengurus pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor;
7. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana pembangunan, evaluasi dan pelaporan.

**(2) Bidang Tata Lingkungan yang mempunyai tugas:**

- a. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang tata lingkungan;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Tata Lingkungan, melaksanakan fungsi:

1. Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
2. Penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
3. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);
4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
5. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
6. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
7. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (Produk Domestik Bruto dan Produk Domestik Regional Bruto hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);



8. Sinkronisasi RPPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
9. Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam (NSDA) dan Lingkungan Hidup;
10. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
11. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
12. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
13. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
14. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
15. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
16. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
17. Pemantauan dan evaluasi KLHS;
18. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), izin lingkungan, Audit Lingkungan Hidup, Analisis resiko Lingkungan Hidup);
19. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
20. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
21. Pelaksanaan proses izin lingkungan;
22. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
23. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
24. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
25. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
26. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
27. Pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan penyusunan profil emisi GRK;
28. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
29. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
30. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
31. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
32. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.

### **(3) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun**

#### **(B3) yang mempunyai tugas:**

- a. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan sampah dan limbah B3;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, melaksanakan fungsi:



1. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota;
2. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
3. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
4. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
5. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
6. Pembinaan pendaur ulangan sampah;
7. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
8. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
9. Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota;
10. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
11. Penyediaan sarpras penanganan sampah;
12. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
13. Penetapan lokasi tempat Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah;
14. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
15. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
16. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
17. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
18. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
19. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
20. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
21. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
22. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
23. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
24. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
25. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
26. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
27. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;

28. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
29. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
30. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis; dan
31. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3.

#### **(4) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup**

**yang mempunyai tugas:**

1. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup,**

**melaksanakan fungsi:**

1. Pelaksanaan pemantauan kualitas air;
2. Pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
3. Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
4. Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
5. Penentuan baku mutu lingkungan;
6. Penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
7. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
8. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
9. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
10. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
11. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
12. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;

13. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
14. Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
15. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
16. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
17. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; dan
18. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.

#### **(5) Bidang Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan**

##### **Hidup yang mempunyai tugas:**

1. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penegakan hukum dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup,

melaksanakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
2. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
4. Penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
5. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
6. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
7. Sosialisasi tata cara pengaduan;
8. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
10. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

11. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
12. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
13. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
14. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
15. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
16. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
17. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
18. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
19. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
20. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
21. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
22. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
23. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
24. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
25. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
26. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
27. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
28. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;
29. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;
30. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;
31. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh Lingkungan Hidup;
32. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli Lingkungan Hidup;
33. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
34. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;
35. Pengembangan jenis penghargaan Lingkungan Hidup;

36. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan Lingkungan Hidup;
37. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
38. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan
39. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional

Kondisi pelayanan sebelum adanya perubahan Organisasi Perangkat Daerah yang baru, guna mendukung pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi pada urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup masih terpecah pada beberapa perangkat daerah dengan nomenklatur berbeda. Perangkat daerah dimaksud adalah Badan Lingkungan Hidup (BLH) yang mempunyai tugas dan fungsi terutama pada terkait dengan tata lingkungan, pengelolaan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta penegakan hukum dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup. Tugas dan fungsi lainnya yakni pengelolaan sampah, masih merupakan bagian tugas dan fungsi dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR).

Dukungan personil pada BLH Kabupaten Malang berjumlah 42 orang yang terdiri dari 17 orang pejabat eselon sesuai struktur organisasi yang ada dan 25 orang staf. Sedangkan dukungan terhadap pengelolaan sampah saat 20 ini masih tergabung dalam 1 (satu) bidang pada DCKTR yaitu bidang kebersihan dan pertamana, serta pada 7 (tujuh) Unit Pelaksana Teknis (UPT). Jumlah personel pada bidang tersebut sebanyak 20 (dua puluh) orang dengan tugas dan fungsi masih bergabung antara layanan kebersihan dan pengangkutan, pembinaan dan pengolahan persapahan, serta pertamanan dan makam. Sedangkan pada UPT terdapat 355 personel pendukung. Seluruh dukungan personel tersebut akan



direview kembali sesuai tugas dan fungsi baru termasuk penyesuaian dengan tugas dan fungsi UPT yang akan dibentuk.

## 2.2 Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup

### a. VISI dan MISI

Mengacu pada isu strategis yang telah diidentifikasi, juga mengacu pada visi, misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2016 – 2021 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021. Visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2016 – 2021 adalah "Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP MANTEP MANETEP" yang diartikan sebagai masyarakat Kabupaten Malang yang istiqomah dan memiliki mental bekerja keras guna mencapai kemajuan pembangunan daerah yang nyata berbasis perdesaan. Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 (tujuh) misi. Pada salah satu misi yakni misi ke-7 **"Memperkokoh Kesadaran Dan Perilaku Masyarakat Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup"** mempunyai arah keterkaitan yang sangat jelas dengan urusan lingkungan hidup yang merupakan urusan pemerintahan yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

Tujuan dari misi ke 7 tersebut adalah: Meningkatkan kebersamaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Adapun sasaran pada tujuan tersebut yang berkaitan dengan tupoksi Dinas Lingkungan Hidup terutama adalah pada sasaran pertama yakni Meningkatnya

kualitas lingkungan hidup. Guna mencapai visi misi yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang menyusun rencana pelaksanaan dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan; Peningkatan Pengendalian Polusi; Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan serta Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam. Rencana tersebut selanjutnya akan menjadi acuan dalam pelaksanaan operasional kegiatan perangkat daerah yang akan dijabarkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja). Pada strategi dan arah kebijakan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, ditetapkan 3 (tiga) strategi umum yang salah satunya adalah meningkatkan kualitas lingkungan 36 hidup. Dengan dimasukkannya peningkatan kualitas lingkungan hidup sebagai salah satu strategi umum, maka masalah lingkungan hidup harus menjadi program atau kebijakan prioritas dalam seluruh kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Malang. Hal ini menjadi salah satu faktor pendorong yang mempengaruhi pencapaian visi misi serta tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Malang.

#### **b. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup**

Tujuan kepala daerah terpilih sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021 yang terkait dengan urusan berdasarkan layanan fungsi utama Dinas Lingkungan Hidup adalah meningkatkan kebersamaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan berwawasan



lingkungan. Sedangkan sasarannya adalah meningkatnya kualitas lingkungan hidup. Terkait dengan tujuan dan sasaran tersebut, untuk mendukung pencapaiannya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

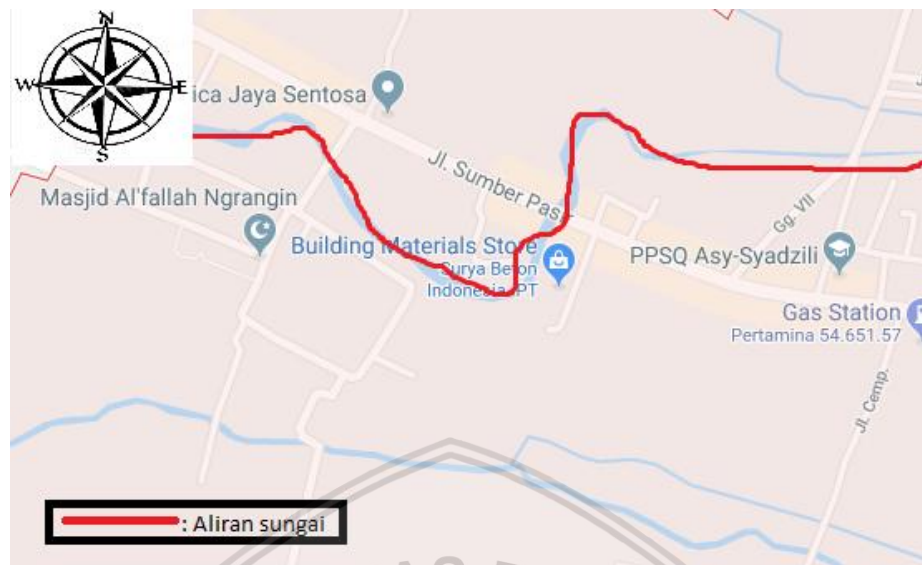
Tujuan:

1. Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran air dan udara;
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
3. Meningkatkan fungsi perlindungan dan pengawasan dalam pengelolaan SDA yang berkelanjutan.

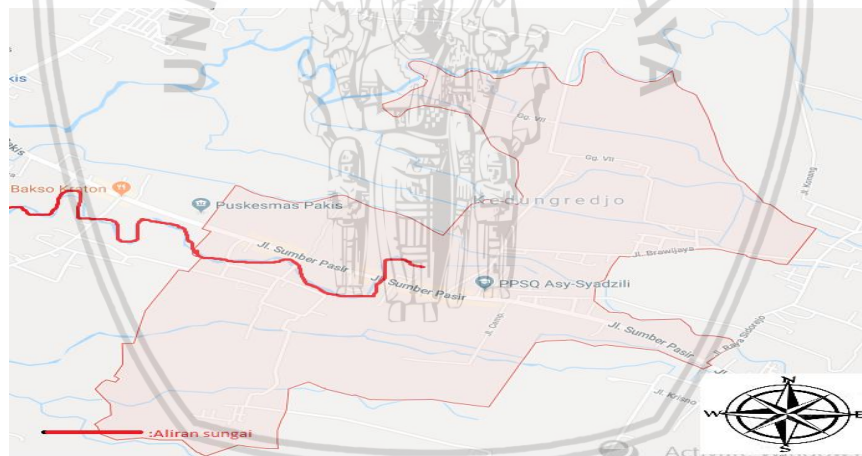
Sasaran:

1. Terpeliharanya kualitas air;
2. Terpeliharanya kualitas udara;
3. Meningkatnya penanganan sampah;
4. Meningkatnya kesadaran dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan;
5. Terpeliharanya daerah resapan air dan sumber air;
6. Meningkatnya fungsi koordinasi dalam identifikasi tutupan vegetasi;
7. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim.

**3. Sungai Cokro dan PT. Sumber Naga Cemerlang (PT. SNC)**



**Gambar 4.3**  
**Lokasi Sungai Cokro Kabupaten Malang**



**Gambar 4.4**  
**Peta Desa Sumberpasir Kecamatan Pakisaji**

PT. Sumber Naga Cemerlang tersebut berada di Jalan Raya Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. Pabrik PT SNC terletak persis diatas Sungai Cokro yang mengalir di Daerah Sumberpasir serta berada di dekat Dusun Ngrangin. Perusahaan tersebut merupakan pabrik yang memproduksi kertas belum siap pakai

yang selanjutnya akan didistribusikan kepada pabrik pengolahan kertas untuk dijadikan kertas siap pakai, perusahaan tersebut diketahui melaksanakan industrinya sejak tahun 2013 silam hingga sekarang, dan kertas hasil produksi pabrik tersebut telah didistribusikan ke pabrik di Surabaya hingga luar negeri. Pabrik SNC sejak tahun 2016 silam telah ikut mendukung kegiatan pemerintah dengan menggunakan bahan bekas sebagai bahan baku produksi kertas mereka. Diketahui pimpinan PT SNC memiliki jaringan luas dengan perusahaan lain.

#### **B. Efektivitas Penerapan Pasal 51 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup**

Pada waktu terlahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup tentunya diharapkan bisa diterapkan secara maksimal agar terlaksananya Pemerintahan yang baik, yang bisa diterapkan pula di seluruh daerah di Kabupaten Malang tak terkecuali di Desa Sumberpasir. Setelah ada Peraturan Daerah ini juga diharapkan masyarakat bisa merasakan lingkungan hidup yang bersih di daerah sekitar mereka. Pelaksanaan peraturan tentang lingkungan hidup ini seharusnya justru bisa lebih baik dikarenakan telah lahirnya peraturan yang baru yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut Perda PPLH).

Tetapi adapun peraturan ini masih tidak berjalan dengan baik dikarenakan banyaknya kendala dari pemerintah untuk menerapkan peraturan tersebut, khususnya

di desa Sumberpasir yang menjadi lokasi penelitian oleh penulis. Dimana di lokasi tersebut telah terjadi pembuangan limbah secara sembarangan oleh PT SNC yang telah dilakukan sejak lama. Akan sayangnya, pemerintah hingga saat ini belum efektif untuk memberikan sanksi administratif yang seperti tertulis di Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Indikator dari keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur masyarakat dapat dilihat dari sudut pandang keefektivitasannya. Efektivitas hukum secara tata bahasa dapat diartikan sebagai keberhasilmgunaan hukum, hal ini berkenaan dengan keberhasilan pelaksanaan hukum itu sendiri, sejauh mana hukum atau peraturan itu berjalan optimal dan efisien atau tepat sasaran. Studi perihal efektivitas hukum bertujuan untuk mengetahui strategi – strategi akan suatu perumusan masalah yang bersifat umum di dalam pelaksanaan hukum, yaitu suatu perbandingan antara ideal hukum dan realitas hukum atau dapat juga disebut *das sollen* dan *das sein*. Efektivitas dari suatu peraturan perundang-undangan dapat dinilai dari perbandingan *das sollen* serta *das sein* nya, jika dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan atau hambatan atas hal tersebut maka dapat dikatakan pelaksanaan atas suatu peraturan perundang-undangan tersebut belum bisa dikatakan efektif.

Belum efektifnya pelaksanaan perlindungan asuransi bagi wisatawan disebabkan oleh berbagai macam faktor yang mempengaruhi. Namun apabila dikaitkan dengan teori efektivitas hukum yang disampaikan oleh Lawrence M. Friedman terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhi efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan, adapun ketiga faktor adalah ;

- 1) Substansi Hukum
- 2) Struktur Hukum
- 3) Budaya Hukum

Ketiga faktor diatas merupakan landasan yang peneliti gunakan untuk mengetahui keefektivisan pelaksanaan Pasal 51 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

### **B.1. Substansi Hukum**

Substansi hukum dalam hal ini ialah merupakan faktor-faktor inti dari yang ada pada suatu perundang-undangan itu sendiri. Adapun faktor hukum yang berkaitan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup diatur dalam Pasal 51 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup belum efektif jika memberikan perlindungan bagi masyarakat.

Mengenai realita kasus pencemaran lingkungan di Sungai Cokro Kabupaten Malang serta bagaimana efektivitas Pasal 51 Perda Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang mengatur sanksi administratif di Kabupaten Malang terhadap pencemaran limbah yang dilakukan oleh PT. SNC terjadi sejak beberapa tahun yang lalu.

Pencemaran yang terjadi di Sungai Cokro telah terjadi sejak tahun 2013 hingga saat ini hingga saat ini tidak ada tindakan lanjutan agar pencemaran tersebut

berhenti, kegiatan pencemaran ini terjadi akibat oleh perusahaan yang membuang limbah hasil produksi secara langsung ke Sungai Cokro yang dilakukan saat malam hari, di mana sungai tersebut dulunya menjadi tumpuan hajat hidup masyarakat yang berada di sepanjang aliran sungai tersebut.

Lokasi Sungai Cokro berada di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. Sungai ini terletak pada jalan masuk dusun Ngrangin. Penamaan Sungai Cokro masih simpang siur hingga saat ini. Jika dilihat dari aliran sungai Cokro, maka sungai Cokro ini termasuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas yang melintasi Kabupaten Malang.

Pencemaran Lingkungan ini berlangsung sangat kompleks dan signifikan dimana hasil dari wawancara yang dilakukan kepada Kabid Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan, Bapak Eko mengatakan:<sup>1</sup>

”Bahwa pencemaran terjadi dilakukan oleh PT SNC, pencemaran terjadi dikarenakan PT SNC tidak memiliki pengelolaan limbah secara teknis dan limbah yang dihasilkan oleh kegiatan produksi tersebut tidak bisa diatasi dengan IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) yang dimiliki perusahaan, sehingga memilih jalan pintas dengan membuang langsung ke aliran sungai”

Lebih lanjut diuraikan oleh Pak Eko:<sup>2</sup>

“Langkah pertama yang sudah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup yaitu meminta perusahaan untuk menghentikan proses produksi saat itu juga, tetapi perusahaan tetap ingin melakukan kegiatan produksi, maka DLH memberi saran dengan perusahaan untuk melakukan pengelolaan limbah diserahkan kepada pihak ke-3 (ketiga), tetapi perusahaan melakukan penampungan lanjutan dengan membeli IPAL, akan tetapi upaya tersebut tidak mengatasi kapasitas limbah dan terjadilah pembuangan limbah secara diam-diam oleh perusahaan”

---

<sup>1</sup> Wawancara kepada Bapak Eko Kabid Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang pada tanggal 23 April 2018 pukul 09.25 WIB

<sup>2</sup> *Ibid*



Pemberian sanksi berupa teguran tertulis tersebut diharapkan dapat membuat perusahaan meninjau kembali kegiatan produksinya agar ramah lingkungan, serta masyarakat tidak terganggu dengan kegiatan produksi perusahaan, dengan pemberian sanksi tersebut diharapkan efektif untuk menghentikan kegiatan pencemaran serta dapat memulihkan kondisi terdampak limbah.

Walaupun banyak terjadi pelaporan oleh masyarakat serta sanksi yang diberikan sejak tahun 2017 nyatanya kegiatan pencemaran ini masih terjadi meskipun tidak separah pada tahun sebelumnya berdasarkan wawancara lapangan yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa masyarakat sekitar Daerah Aliran Sungai. Ibu Nanik warga Desa Sumberpasir mengatakan:<sup>3</sup>

”Bahwa masih terjadi pencemaran limbah berupa bau yang sangat menyengat dan membuat air menjadi keruh serta tak bisa lagi dimanfaatkan oleh warga karena air yang terkena pencemaran kegiatan produksi tersebut menyebabkan penyakit kulit, yaitu gatal-gatal”

Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan narasumber lainnya, narasumber berikutnya yaitu Bapak Ngateman yang juga warga Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis yang mengatakan:<sup>4</sup>

”Kegiatan pencemaran masih terjadi tapi intensitasnya rendah, dalam arti tidak setiap terjadi pencemaran terdapat tanda-tanda terjadi pencemarannya yaitu berupa terjadinya perubahan warna pada air sungai menjadi kebiruan yang berbau menyengat setelah itu air berwarna keputihan dan muncul benda padat berupa limbah dari pabrik tersebut”

Dari beberapa pemaparan hasil wawancara terhadap masyarakat tersebut penulis melakukan perbandingan dengan data pembandingan yaitu hasil

---

<sup>3</sup> Di dapatkan melalui studi wawancara kepada masyarakat yang bernama Ibu Nanik yang berdomisili di Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang pada tanggal 20 Maret 2018 pukul 08.30 WIB

<sup>4</sup> Di dapatkan melalui studi wawancara kepada masyarakat yang bernama Bapak Ngateman yang berdomisili di Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang pada tanggal 20 Maret 2018 pukul 09.10 WIB



wawancara dengan Kabid penegakan hukum mengenai keefektifan sanksi administrasi tersebut. Dalam hal ini Kabid penegakan hukum dan peningkatan kapasitas lingkungan mengatakan:<sup>5</sup>

” mengenai sanksi administrasi berupa teguran tertulis tersebut dirasa cukup efektif meskipun belum maksimal karena beberapa sedikit kendala”, dari hasil perbandingan tersebut maka dapat ditinjau kembali penegakan sanksi administrasi belum efektif dikarenakan tidak sinkronnya pernyataan Kabid penegakan hukum dan peningkatan kapasitas lingkungan dengan realita di lapangan.

Pencemaran yang terjadi di sungai Cokro merupakan pencemaran yang dikatakan cukup lama untuk sebuah tindakan menyimpang, seperti yang diketahui bahwa aktivitas pencemaran ini berlangsung sejak 2013 hingga saat ini, hal ini dapat menjadi pedoman bahwa penerapan sanksi administrasi belum memberikan dampak yang positif, yang seharusnya pemberian sanksi tersebut diharapkan menjadi alat untuk mengendalikan pencemaran tersebut.

## **B.2. Struktur Hukum**

Struktur hukum merupakan para penegak hukum, adapun yang dimaksud penegak hukum ialah para pihak yang menegakan hukum secara langsung serta terlibat di bidang penegakan hukum tersebut. Dalam hal ini pihak yang terlibat dalam penegakan hukum adalah Dinas Lingkungan sebagai pengawas terjadinya kerusakan lingkungan hidup serta Bupati sebagai pemberi sanksi administratif terhadap pelanggar Lembar Negara Republik Indonesia Pasal 22 ayat (1) Peraturan

---

<sup>5</sup> Wawancara kepada Bapak Eko Kabid Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang pada tanggal 23 April 2018 Pukul 09.25 WIB

## Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air

Pada sub bab ini penulis memaparkan apa yang menjadi kendala dalam penerapan sanksi administrasi tersebut dari perspektif internal penegakan hukum, dimana kendala dalam penegakan sanksi tersebut membuat sanksi tersebut kurang efektif kendala tersebut diperoleh penulis melalui studi wawancara kepada kabid penegakan hukum dan peningkatan kapasitas lingkungan, Bapak Randy mengatakan<sup>6</sup>,

”kendala yang terjadi yaitu, air limbah tersebut tak bisa terpisah dengan air lain, sehingga perusahaan tersebut bisa membuat alibi dan saat membuang limbah tersebut ke sungai susah untuk diawasi karena air limbah tersebut tidak dipisah terlebih dahulu dimana melalui pipa pembuangan non-limbah dan pembuangan bersifat limbah”

Selain dari itu kendala yang terjadi yaitu minimnya pengawasan yang dilakukan sehingga Dinas Lingkungan Hidup sulit untuk memberikan sanksi lanjutan dan sejak saat itu perusahaan tersebut ikut mendukung kegiatan menggunakan barang bekas sebagai barang baku produksi Langkah lanjutan yang seharusnya ditempuh oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dalam penegakan sanksi administrasi, seperti kita ketahui dalam Pasal 51 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Malang:

### a. teguran tertulis;

---

<sup>6</sup> Di dapatkan melalui studi wawancara kepada bapak Randy Seksi Pengawasan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang pada tanggal 23 April 2018 pukul 10.00 WIB

- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin lingkungan; atau
- d. pencabutan izin lingkungan

Pasal tersebut kemudian diperbaharui pada tahun 2016 dengan Pasal 84 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang masih memiliki isi yang sama dengan Perda sebelumnya. Dengan penjelasan pasal tersebut maka seharusnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang perlu untuk mempertimbangkan sanksi lanjutan berupa paksaan pemerintah, namun hal tersebut bukan serta merta tidak didasari penyelidikan DLH, dalam memberikan sanksi lanjutan tersebut DLH harus memberikan bukti-bukti bahwa perusahaan masih tetap melakukan pencemaran sungai.

### **B.3. Budaya Hukum**

Budaya hukum adalah bagaimana sikap masyarakat hukum di tempat hukum itu dijalankan. Apabila kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dapat diterapkan maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung. Namun, bila masyarakat tidak mau mematuhi peraturan yang ada maka masyarakat akan menjadi faktor penghambat utama dalam penegakan peraturan yang dimaksud.

Budaya masyarakat tidak terlepas bagaimana jalannya dari penerapan hukum itu sendiri. Jika budaya masyarakat positif, maka penerapan hukum akan berjalan lancar. Demikian sebaliknya, jika budaya hukum negatif, maka penerapan hukum juga akan menemui hambatan. Budaya hukum negatif ini ditemukan oleh penulis di Dusun Ngrangin, Desa Sumberpasir saat melakukan wawancara dengan

bapak Samad, selaku salah satu warga dusun Ngrangin yang mengeluh akan limbah pabrik tersebut:<sup>7</sup>

“Warga sebetulnya banyak yang memprotes kegiatan pabrik tersebut, tetapi sayangnya ada juga warga yang justru tutup mulut terhadap kegiatan pencemaran pabrik tersebut dikarenakan mereka diberi pekerjaan di dalam pabrik tersebut sebagai pengganti uang tutup mulut”

Hal ini tentunya berdampak buruk terhadap warga dusun serta menghambat penegakan hukum yang sedang berlaku serta dengan masyarakat yang memiliki perbedaan kepentingan bisa menyebabkan konflik horizontal. Akan tetapi hal tersebut tidak sepenuhnya mengurangi niat warga untuk mendapatkan air bersih serta udara yang tidak tercemar oleh bau limbah seperti bapak Samad menambahkan:

“Pencemaran masih terjadi akan tetapi sangat sulit untuk dideteksi, walaupun telah dibentuk tim investigasi oleh warga Ngrangin untuk menangkap basah kegiatan pencemaran tersebut, karena perusahaan tersebut membuang limbah pada saat malam hari dan hari di mana jadwal pembuangan limbah secara sembarangan tersebut berubah-ubah sehingga sulit dideteksi oleh masyarakat yang akan melakukan pelaporan terhadap Dinas Lingkungan Hidup karena bukti yang kurang”

Pernyataan bapak Samad tersebut mengaskan bahwa warga telah menerapkan budaya hukum positif untuk melancarkan penegakan hukum dan menjadi faktor pendukung pemerintah dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Sanksi Administratif. Maka dapat dikatakan bahwa peran budaya hukum disini

---

<sup>7</sup> Di dapatkan melalui studi wawancara kepada masyarakat yang bernama Bapak Samad yang berdomisili di Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang pada tanggal 20 Maret 2018 pukul 09.49 WIB

tentunya bisa efektif secara maksimal bila semua elemen masyarakat turut aktif dalam melakukan penegakan hukum secara bersama.

### **C. Kendala Yang Memengaruhi Dalam Penerapan Pasal 51 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup**

Penerapan Pasal 51 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup tidak terlepas dari kendala-kendala yang menghambat penegakan berdasarkan dari Peraturan Daerah tersebut. Dalam hal ini penulis mengklasifikasikan kendala tersebut dengan teori yang telah dipaparkan oleh Soerjono Soekanto yang menyebutkan bahwa efektivitas hukum, hukum yang berfungsi dengan baik merupakan tanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu bertujuan untuk mempertahankan serta melindungi masyarakat.<sup>8</sup> Terdapat 5 (Lima) Faktor yang mempengaruhinya yaitu:<sup>9</sup>

#### **1. Faktor hukum**

Dalam Undang-Undang arti materiil merupakan peraturan tertulis yang berlaku umum dan dirancang oleh penguasa di tingkat pusat maupun daerah yang sah. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku, termasuk juga ditaati oleh para penegak hukumnya. Tingkat kepatuhan hukum

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm 19.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, *Op.Cit*, hlm 8

yang tinggi merupakan tolak ukur berhasilnya atau berfungsinya suatu sistem hukum yang berlaku, maka undang-undang dalam materiil mencakup:

- a. Peraturan pusat yang berlaku untuk seluruh warga Negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum disebagian wilayah Negara.
- b. Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau disuatu daerah saja.

Akan tetapi, tidak hanya sebatas yang telah disebutkan tentang efektifnya suatu undang-undang yang menyatakan bahwa suatu hukum dikatakan efektif apabila masyarakat berperilaku sesuai dengan yang telah diharapkan atau dikehendaki oleh hukum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum dapat dikatakan efektif apabila suatu peraturan yang dibuat secara tertulis berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam kasus ini, regulasi berkaitan dengan pencemaran lingkungan telah diatur dalam peraturan setempat, artinya peraturan yang hanya berlaku di suatu tempat atau di suatu daerah yang saja. Dalam hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Nomor Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Perda PPLH). Perda tersebut telah menggantikan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengendalian dan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Pemerintah Kabupaten Malang telah memberikan pengaturan yang jelas mengenai lingkungan, tidak terkecuali berkaitan dengan limbah. Dalam Perda PPLH telah disebutkan secara rinci larangan apa saja yang tidak boleh



dilakukan dan penegakan hukum serta lembaga yang menegakkan hukum tersebut. Faktanya masih terdapat warga masyarakat (PT. SNC) yang melanggar ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Pasal 51 Perda PPLH.

Sehingga aspek hukum dapat dikatakan belum efektif, sebagaimana dikatakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu hukum dikatakan efektif apabila masyarakat berperilaku sesuai dengan yang telah diharapkan atau dikehendaki oleh hukum, hukum dapat dikatakan efektif apabila suatu peraturan yang dibuat secara tertulis berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga tujuan yang diinginkan kedudukan dan peranan.

## **2. Faktor Penegak Hukum (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang)**

Secara sosiologi, setiap penegakan hukum mempunyai amanah, yang mencakup hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu, hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu tadi merupakan peranan. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan. Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bidang Penegakan Hukum yang dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan penegakan



hukum melalui penerapan sanksi:<sup>10</sup> ”mengenai sanksi administrasi berupa teguran tertulis tersebut dirasa cukup efektif meskipun belum maksimal karena beberapa sedikit kendala”. Fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup pada dasarnya sudah cukup baik namun masih belum efektif. Salah satu penyebab kendala tidak efektifnya pengawasan dalam pencemaran limbah pabrik PT SNC ini ialah minimnya kuantitas SDM pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang. Dimana jumlah pegawai Dinas Lingkungan Hidup yang mengurus Pemantauan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hanya berjumlah 8 orang pegawai.

Dengan jumlah tenaga pegawai yang sangat sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah perusahaan industri di Kabupaten Malang yang berjumlah kurang lebih 267 jelas tidak cukup untuk mengontrol masalah pencemaran lingkungan. Oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan terkini ada sekitar 20 % perusahaan industri di Malang yang tidak memenuhi syarat pengelolaan limbah industri.<sup>11</sup> jelas tidak cukup untuk mengontrol masalah pencemaran lingkungan. Oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan terkini ada sekitar 20 % perusahaan industri di Malang yang tidak memenuhi syarat pengelolaan limbah industri.<sup>12</sup>

### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Peranan Hukum

---

<sup>10</sup> Di dapatkan melalui studi wawancara kepada bapak Eko Kabid Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang pada tanggal 23 April 2018 pukul 09.25 WIB

<sup>11</sup> <https://jatim.bps.go.id/> pada tanggal 21 Mei 2018 pukul 09.25 WIB

<sup>12</sup> <https://www.liputan6.com/> pada tanggal 24 Mei 2018 pukul 21.30 WIB

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung lancar dan efektif. Sarana atau fasilitas antara lain mencakup sumber daya manusia, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.

Dinas Lingkungan Hidup dapat dikatakan masih belum cukup memadai untuk melakukan pengawasan. Misalnya, alat untuk mengetes tingkat pencemaran limbah relatif masih sedikit. serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang belum memiliki laboratorium sendiri untuk melakukan tes laboratorium dan harus meminjam laboratorium dari luar instansi.<sup>13</sup>

### **3. Faktor Masyarakat**

Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Kepatuhan hukum dan perilaku masyarakat dalam kehidupan diantaranya, ada yang sendirinya taat pada hukum dan ada yang pura-pura menaatinya, ada yang tidak mengacuhkan sama sekali dan ada pula yang dengan terang-terangan melawan hukum.

Dalam kasus ini PT. SNC tidak menaati hukum secara jelas, yang pada akhirnya PT. SNC telah melakukan upaya atas teguran dari Dinas Lingkungan Hidup meskipun masih terdapat pelanggaran yang dilakukan.

---

<sup>13</sup> Di dapatkan melalui studi wawancara kepada bapak Randy Seksi Pengawasan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang pada tanggal 23 April 2018 pukul 10.00 WIB

Hal yang sama diungkapkan Bapak Ngateman yang juga warga Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis mengatakan:<sup>14</sup>

”Kegiatan pencemaran masih terjadi tapi intensitasnya rendah, dalam arti tidak setiap saat, tanda-tanda terjadi pencemarannya yaitu berupa terjadinya perubahan warna pada air sungai menjadi kebiruan yang berbau menyengat setelah itu air berwarna keputihan dan muncul benda padat berupa limbah dari pabrik tersebut”.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor masyarakat masih relatif belum efektif, dikarenakan masih terdapat masyarakat yang tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan.

#### **4. Faktor Kultur / Budaya Hukum**

Budaya hukum adalah bagaimana sikap masyarakat hukum di tempat hukum itu dijalankan. Apabila kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dapat diterapkan maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung. Namun, bila masyarakat tidak mau mematuhi peraturan yang ada maka masyarakat akan menjadi faktor penghambat utama dalam penegakan peraturan yang dimaksud.

salah satu yang menonjol adalah budaya masyarakat. Budaya masyarakat tidak terlepas bagaimana jalannya dari penerapan hukum itu sendiri.

Jika budaya masyarakat positif, maka penerapan hukum akan berjalan lancar.

---

<sup>14</sup> Di dapatkan melalui studi wawancara kepada masyarakat yang bernama Bapak Ngateman yang berdomisili di Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang pada tanggal 20 Maret 2018 pukul 09.10 WIB

Demikian sebaliknya, jika budaya hukum negatif, maka penerapan hukum juga akan menemui hambatan. Hasil wawancara dengan masyarakat desa ditemukan data lapangan, bahwa PT. SNC telah memberi pekerjaan kepada sebagian masyarakat Desa Sumberpasir agar masyarakat yang diberikan pekerjaan itu bisa “tutup mulut” atas kegiatan pencemaran yang dilakukan oleh PT. SNC<sup>15</sup>. Dengan kondisi yang demikian itu maka akan melemahkan tegaknya penerapan hukum itu sendiri, karena ada sebagian masyarakat yang bisa diatur untuk tidak mempersoalkan masalah pencemaran yang dilakukan oleh PT SNC dan yang paling berbahaya adalah bisa terjadi konflik horizontal diantara masyarakat Desa Sumberpasir karena beda kepentingan.

Secara umum efektivitas penerapan Pasal 51 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup berdasarkan faktor/indikator tersebut masih relatif belum efektif. Dari kelima faktor (hukum, penegakan hukum, sarana prasarana, masyarakat, dan kebudayaan) masih menunjukkan belum efektif secara keseluruhan.

#### **D. Upaya Mengatasi Kendala Terkait Kendala Yang Memengaruhi Dalam Penerapan Pasal 51 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup**

Dengan melihat faktor-faktor kendala tersebut diatas maka diperlukan cara-cara tepat untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi agar Penerapan Pasal 51

---

<sup>15</sup> Di dapatkan melalui studi wawancara kepada masyarakat yang bernama Bapak Ngateman yang berdomisili di Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang pada tanggal 20 Maret 2018 pukul 09.10 WIB

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup berjalan dengan baik yaitu:

### 1. Faktor Hukum

Penerapan Pasal 51 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang relatif masih belum efektif perlu ditingkatkan, mengenai PT SNC yang hingga saat ini masih membuang limbahnya secara langsung ke Sungai Cokro Hingga ketidakmampuan PT SNC untuk menanggulangi hasil limbah dari produksinya belum dikenai sanksi administrasi lanjutan dari teguran tertulis seperti yang tertera pada penerapan Pasal 51 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yaitu paksaan dari pemerintah daerah yang bisa Adapun penerapan sanksi paksaan pemerintah dapat dijatuhkan pula tanpa didahului dengan teguran tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:

- 1) ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
- 2) dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
- 3) kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Sanksi paksaan pemerintah dapat dilakukan dalam bentuk:

- 1) penghentian sementara kegiatan produksi;
- 2) pemindahan sarana produksi;

- 3) penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
- 4) pembongkaran;
- 5) penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- 6) penghentian sementara seluruh kegiatan; dan/atau
- 7) tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

## **2. Faktor Penegak Hukum (Dinas Lingkungan Hidup)**

Dengan melakukan pelatihan atau peningkatan kualitas SDM tim pengawas Dinas Lingkungan Hidup dalam berbagai hal. Yakni dengan melanjutkan pendidikannya atau member pelatihan khusus untuk meningkatkan skill yang berguna untuk melakukan pemantauan kerusakan lingkungan. Hal tersebut akan sangat efektif dilakukan,. Sehingga dapat mewujudkan tujuan-tujuan meningkatkan peran serta masyarakat yang ada di desa plandi tersebut. Atau dapat juga disediakan tempat pengaduan yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan oleh masyarakat jika suatu saat terjadi pelanggaran yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup yang terjadi dalam lingkungan masyarakat di saat kapanpun bila diperlukan secara cepat. Serta dengan meningkatkan jumlah personil dari tim pemantauan kerusakan lingkungan hidup juga diperlukan karena bisa meningkatkan ke efektifan dalam pengawasan kerusakan lingkungan hidup.

### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Peranan Hukum

Dengan laboratorium sendiri untuk melakukan tes laboratorium dan menggunakan laboratorium dari dalam instansi, hal ini tentu membuat kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dalam melakukan pengawasan terhadap pencemaran sungai di wilayah Kabupaten Malang sehingga lebih maksimal. Karena selama ini Dinas Lingkungan Hidup masih meminjam laboratorium dari luar instansi sehingga fasilitas pendukung dalam penerapan pencegahan pencemaran lingkungan hidup belum efektif.<sup>16</sup>

### 4. Faktor Masyarakat

Masyarakat Kabupaten Malang perlu meningkatkan kesadaran dalam hukum untuk menyadari bahwa perbuatan PT SNC telah melanggar peraturan tentang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup serta meningkatkan kerja sama mereka selama ini dalam mengawasi perbuatan pencemaran yang terjadi di daerah mereka. Hal ini sesuai dengan wawancara dari Bapak Samad warga Dusun Ngrangin masih terletak di Desa Sumberpasir, mengatakan:<sup>17</sup>

“Pencemaran masih terjadi akan tetapi sangat sulit untuk dideteksi, jadi kami telah dibentuk tim investigasi oleh warga Ngrangin untuk menangkap basah kegiatan pencemaran tersebut, karena perusahaan tersebut membuang limbah

---

<sup>16</sup> Di dapatkan melalui studi wawancara kepada bapak Randy Seksi Pengawasan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang pada tanggal 23 April 2018 pukul 10.00 WIB

<sup>17</sup> Di dapatkan melalui studi wawancara kepada masyarakat yang bernama Bapak Samad yang berdomisili di Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang pada tanggal 20 Maret 2018 pukul 09.45 WIB



pada saat malam hari dan hari dimana jadwal pembuangan limbah secara sembarangan tersebut berubah-ubah sehingga sulit dideteksi oleh masyarakat yang akan melakukan pelaporan terhadap Dinas Lingkungan Hidup karena bukti yang kurang”

Jika dalam masyarakat telah melakukan pengawasan terhadap perusahaan tersebut secara aktif dan positif maka mereka turut membantu dalam pelaksanaan Pasal 51 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

#### **5. Faktor Kultur / Budaya**

Bahwa pada faktor ini masyarakat perlu meningkatkan kesadaran bagi masyarakat pemilik dan/ atau pemilik pabrik yang tidak mengetahui tentang adanya Pasal 51 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang kini diperbaharui menjadi Pasal 84 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang membahas tentang sanksi administratif untuk pabrik yang melanggar ketentuan syarat Izin Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. masyarakat tidak terlepas bagaimana jalannya dari penerapan hukum itu sendiri. Jika budaya masyarakat positif, maka penerapan hukum akan berjalan lancar.

Serta dalam hal ini terhadap masyarakat yang masih ada yang menerima pekerjaan dari perusahaan yang telah mencemari lingkungan sebagai ganti

tutup mulut atas perbuatan perusahaan tersebut yang telah merugikan warga sekitar, setiap persoalan yang bisa diselesaikan dengan suatu imbalan secara langsung belum tentu bukan persoalan yang benar di dalam hukum maupun norma. Hendaknya sebagian masyarakat desa Sumberpasir lebih mendahulukan kepentingan umum demi kebaikan masyarakat serta desa itu sendiri.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Penerapan Pasal 51 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup relatif masih belum efektif. Hal ini berdasarkan dari beberapa faktor yaitu:

- a. Faktor Hukum

Bahwa Faktor Hukum ini masih belum dapat dikatakan Efektif dikarenakan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dalam melakukan penegakan sanksi administratif sesuai dengan penerapan Pasal 51 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup terhadap PT SNC baru sekedar memberikan peringatan tertulis yang telah dikeluarkan sejak lama, padahal PT SNC masih membuang limbahnya ke Sungai Cokro secara diam-diam pada beberapa bulan terakhir.

- b. Penegakan Hukum

Fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup pada dasarnya sudah cukup baik namun masih belum efektif. Hal tersebut disebabkan karena jumlah pegawai Dinas Lingkungan Hidup yang mengurus Pemantauan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hanya berjumlah 8 orang pegawai. Dengan jumlah tenaga pegawai yang

sangat sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah perusahaan industri di Kabupaten Malang yang cukup banyak serta terletak di berbagai lokasi di Kabupaten Malang, jelas tidak cukup untuk mengontrol masalah pencemaran lingkungan.

c. Sarana dan prasarana

Dinas Lingkungan Hidup dapat dikatakan masih belum cukup memadai untuk melakukan pengawasan. Serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang belum memiliki laboratorium sendiri untuk melakukan tes laboratorium dan harus menggunakan laboratorium dari luar instansi, hal ini tentu menjadi kendala bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dalam melakukan pengawasan terhadap pencemaran sungai di wilayah Kabupaten Malang sehingga tidak maksimal.

d. Faktor Masyarakat

Bahwa pada faktor ini masyarakat masih belum dapat dikatakan efektif karena masih kurangnya kesadaran dari masyarakat pemilik dan/ atau pemilik pabrik yang tidak mengetahui tentang adanya Pasal 51 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang kini diperbaharui menjadi Pasal 84 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang membahas tentang sanksi administratif untuk pabrik yang

melanggar ketentuan syarat Izin Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup

e. Faktor Budaya

Bahwa pada faktor kebudayaan belum dapat dikatakan efektif karena pengaruh dari masyarakat Kabupaten Malang memiliki kebiasaan apabila menerima sejumlah uang ataupun imbalan, masyarakat cenderung bisa diajak kompromi untuk menyelesaikan suatu perbuatan / persoalan yang belum tentu bisa dibidang perbuatan / persoalan yang dilakukan tersebut adalah perbuatan / persoalan yang benar ataupun salah.

**B. Saran**

**1. Kepada Dinas Lingkungan Hidup**

- a. Penerapan Pasal 51 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang relatif masih belum efektif perlu ditingkatkan, mengenai PT SNC yang hingga saat ini masih membuang limbahnya secara langsung ke Sungai Cokro belum dikenai sanksi administrasi lanjutan dari teguran tertulis seperti yang tertera pada penerapan Pasal 51 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yaitu paksaan dari pemerintah daerah yang bisa berupa tindakan seperti penghentian sementara kegiatan produksi pabrik maupun tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

- b. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan memberikan pelatihan intensif terhadap anggota Dinas Lingkungan Hidup guna mengurangi kegiatan pencemaran lingkungan.
- c. Menambah anggota pengawas pengendalian lingkungan untuk menghilangkan kesenjangan antara staff pengawas yang jumlahnya masih cenderung sedikit dengan jumlah pabrik industri yang tersebar luas di daerah Kabupaten Malang jumlahnya banyak.

## **2. Kepada Masyarakat**

sangat penting untuk meningkatkan kesadaran hukum pada masyarakat, bahwa penegakan hukum itu sangat penting, karena tanpa penegakan hukum yang baik akan menyebabkan rendahnya kesadaran terhadap hukum itu sendiri. Akibatnya keteraturan dalam hidup bermasyarakat akan terganggu. Dalam kasus ini masyarakat masih perlu memiliki kesadaran hukum untuk tidak menerima uang ataupun imbalan untuk menyelesaikan persoalan yang disebabkan oleh PT SNC. Karena setiap persoalan yang bisa diselesaikan dengan suatu imbalan secara langsung belum tentu bukan persoalan yang benar di dalam hukum maupun norma. Hendaknya sebagian masyarakat desa Sumberpasir lebih mendahulukan kepentingan

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Andri G. Wibisana, **Three Principles of Environmental Law: The Polluter Pays Principle, The Principle of Prevention, and the Precautionary Principle**, dalam Michael Faure & Nicole, Niessen (edited), **Environmental Law in Development, Lesson from the Indonesian Experience**, Cheltenham UK-Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing, 2006
- Abdulkadir Muhammad, **Hukum Dan Penelitian Hukum**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- A. Tresna Sastrawijaya, **Pencemaran Lingkungan**, Rineka Cipta, Jakarta, 2000
- Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo, Jakarta, 2003
- Fuad Amsyari **Prinsip-prinsip masalah pencemaran lingkungan**, Ghalia Indonesia, Jakarta 1981
- Harbani Pasalong, **Teori Administrasi Publik**, Alfabeta, Bandung, 2007
- Hasan Sholeh, **Pengantar Sosiologi Hukum**, Salembaeempat, Jakarta, 2002
- Jur. Andi Hamzah, **Penegakan Hukum Lingkungan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Lutfi Effendi S.H., M.Hum, **Pokok-Pokok Hukum Administrasi**, Bayumedia Publishing Cet-2, Malang, 2004
- Lexy. J. Moleong, **Metode Penelitian Kualitatif**, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2007
- Mahmudi, **Manajemen Kinerja Sektor Publik**, Akdemik Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta, 2005
- Muhammad Erwin, **Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup**, Refika Arditama, Bandung, 2011
- Munadjat Danusaputro, **Hukum Lingkungan (Jilid 5 : Dalam Pencemaran Lingkungan Melandasi Sistem Hukum Pencemaran)**, Binacipta, Yogyakarta, 1986



- Mas Achmad Santosa, **Pengembangan dan Penegakan Hukum Administrasi di Bidang Lingkungan Hidup dalam Konteks Otonomi Daerah**, Semarang, 2002
- N.H.T Siahaan, **Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan**, Erlangga, Jakarta, 2009
- Pramudya Sunu, **Melindungi Lingkungan Dengan Menerapkan ISO 14001**, Gramedia Widhiarsana Indonesia, Jakarta, 2001
- Siti Sundari Rangkuti, **Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional**, Airlangga University Press, Surabaya, 1996
- Soerjono Soekamto, **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Soerjono Soekamto, **Sosiologi Organisasi**, Rajawali Press, Bandung, 1996
- Soerjono Soekamto dan Abdullah Mustafa, **Sosiologi Hukum dalam Masyarakat**, Rajawali, Bandung
- Sulkan Yasin dan Sunarto Hapsoyo, **Kamus Besar Bahasa Indonesia, Praktis, Populer dan Kosa Kata Baru**, Mekar, Surabaya, 2008
- Sudharto P. Hadi, **Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan**, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005
- Supriyono, **Sistem Pengendalian Manajemen (Edisi I)**, BPFE Yogyakarta, 2000
- Takdir Rahmadi, **Hukum Lingkungan**, Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;

Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik Pada Dinas Rumahan ,Kawasan Pemukiman Dan Cipta

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah.

## INTERNET DAN JURNAL

[www.belajarbagus.com](http://www.belajarbagus.com), diakses Pada Kamis,22 Februari 2018, Pukul 17.15 WIB

<http://digilib.unila.ac.id/21334/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>

diakses pada hari Senin 5 Februari 2018 20.45

<https://jatim.bps.go.id/> pada tanggal 21 Mei 2018 pukul 09.25 WIB

<https://www.liputan6.com/> pada tanggal 24 Mei 2018 pukul 21.30 WIB

Widia Edorita,**Peranan AMDAL Dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara Asia Tenggara**,2007